



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP
PENGUNGKAPAN SUKARELA DENGAN EFEKTIFITAS DEWAN
KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI**

SKRIPSI

**MOHAMMAD FERRY FERDINAL
0906608405**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP
PENGUNGKAPAN SUKARELA DENGAN EFEKTIFITAS
DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

**MOCHAMMAD FERRY FERDINAL
0906608405**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mochammad Ferry ferdinal

NPM : 0906608405

Tanda Tangan :



Tanggal : 13 Juli 2012

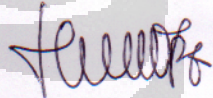
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mochammad Ferry Ferdinal
NPM : 0906608405
Program Studi : Ekstensi Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela dengan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

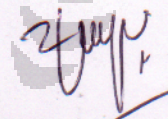
Pembimbing : Vera Diyanti, S.E., M.M.

()

Penguji : Eliza Fatima, S.E., M.E., CPA.

()

Penguji : Aria Farahmita, S.E., Ak., M.S.M., CPA.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi

Sri Nurhayati, S.E., M.M., S.A.S.

NIP: 196003171986022001

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Vera Diyanti, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ide awal topik penulisan skripsi. Beliau juga selalu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Eliza Fatima, S.E., M.E., CPA, dan Ibu Aria Farahmita, S.E., Ak., M.S.M., CPA, selaku dosen penguji yang telah memberikan pertanyaan bermutu, kritik, dan memberi masukan berharga demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ekstensi Akuntansi Ibu Sri Nurhayati, S.E., M.M., S.A.S., yang telah memberikan kemudahan akademis bagi penulis selama menjalani kuliah dan penulisan skripsi ini.
4. Papa dan Mama tercinta, Syamsir Alam, S.H., dan Gustina Tanjung, dan adik tersayang Mochammad Riski Yonanda, yang terus percaya kepada kemampuan penulis, membantu penulis dalam hal materil, dan selalu mengirimkan doa yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan penulis.
5. dr. Gusti Suardana, SpM. yang telah memberikan bantuan dan memberi dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Rekan seperjuangan penulis, Ari Kristian, Dinda Nirmala, Made Ariasta, Bima Bayhaqi, Faizal Rakhmat, Daniel Rheza, Ardiansyah Putra, Alifia,

Nadya Pratiwi, Jemila, dan Citra Agriyani yang terus membantu penulis, dan memberikan masukan disaat penulis mengalami kebuntuan.

7. Teman-teman terbaik penulis, Banibaja Silalahi, Rico Putra, Rehan Hidayat, Fakhri Muzakki, Budi Pamungkas, Andika Maulana, Heidy Ruswita Sari, Brian Winston, Agnes Fristanika, Shinta Asri, Ananda Mutiara, Sri Wahyuningsih, Fitri Ambar, Kausar Ihsan, Ray Andrew, dan Rully Lumbanraja yang telah banyak membantu penulis dengan tulus untuk mencapai kelulusan. Sukses terus untuk kalian semua.
8. Sahabat “Air Terjun Salemba” yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menjalani perkuliahan dan penulisan skripsi.
9. Sahabat “Geng Ketoprak” yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi.
10. Lilia Zuhara, Muslimah Imaniati Asri, Agustina Ika, Arifin Kunto, Muki Ginanjar, Birgitta Nugraheni, Saskhya Aulia, Sri Aninditha, Jazzy Timothy, dan Karina Paramitha yang selalu menyemangati penulis dan menanyakan perkembangan penulisan skripsi penulis.
11. Seluruh pihak yang telah memberi bantuan, dukungan, dan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Rhita Pinta Berliana Simorangkir yang telah banyak menolong penulis dalam mencapai kelulusan, memberi motivasi, dan selalu menjadi inspirasi bagi penulis untuk mencapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat menghargai saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu dan memperluas pengetahuan di bidang akuntansi khususnya.

Jakarta, 13 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ferry Ferdinal

NPM : 0906608405

Program Studi : Ekstensi Akuntansi

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela Dengan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2012

Yang menyatakan



(Mochammad Ferry Ferdinal)

ABSTRAK

Nama : Mochammad Ferry Ferdinal
Dosen Pembimbing : Vera Diyanti S.E., M.M.
Program studi : Ekstensi Akuntansi
Judul : Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengungkapan Sukarela dengan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi

Penelitian ini memberikan bukti empiris atas pengaruh persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi. Pengungkapan sukarela diukur melalui metode skoring indeks pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian Adharini (2006). Sedangkan skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi diperoleh melalui metode skoring yang digunakan dalam penelitian Hermawan (2009). Dengan memakai sampel penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2009 – 2010, menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Efektifitas dewan komisaris tidak terbukti memberikan efek moderasi terhadap kedua variabel tersebut. Sedangkan efektifitas komite audit memperkuat pengaruh negatif hubungan antara kepemilikan keluarga dengan pengungkapan sukarela

Kata kunci :

Kepemilikan keluarga, pengungkapan sukarela, dewan komisaris, komite audit, *Corporate Governance*.

ABSTRACT

Name : Mochammad Ferry Ferdinal
Instructure : Vera Diyanti S.E., M.M.
Study Program : Ekstensi Akuntansi
Title : The Effect of Family Ownership to Voluntary Disclosure with The Effectiveness of The Board of Commissioners and Audit Committee as Moderating Variables

This paper empirically examines the effect of family ownership to voluntary disclosure with the effectiveness of the board commissioners and audit committee as moderating variables. Voluntary disclosure score is measured by index of voluntary disclosure used in Adharini (2006). Effectiveness score of the board commissioners and audit committee obtained by scoring method used in Hermawan (2009). Using hand-collected data from manufacturing firm on BEI in the year 2009 – 2010, shows that level of family firms is negatively associated with the level of voluntary disclosure. Effectivity of board of commissioners does not give moderation effect. But effectivity of audit committee strengthen the negative effect between family ownership and voluntary disclosure.

Keywords :

Family ownership, voluntary disclosure, board of commissioner, audit committee, corporate governance.

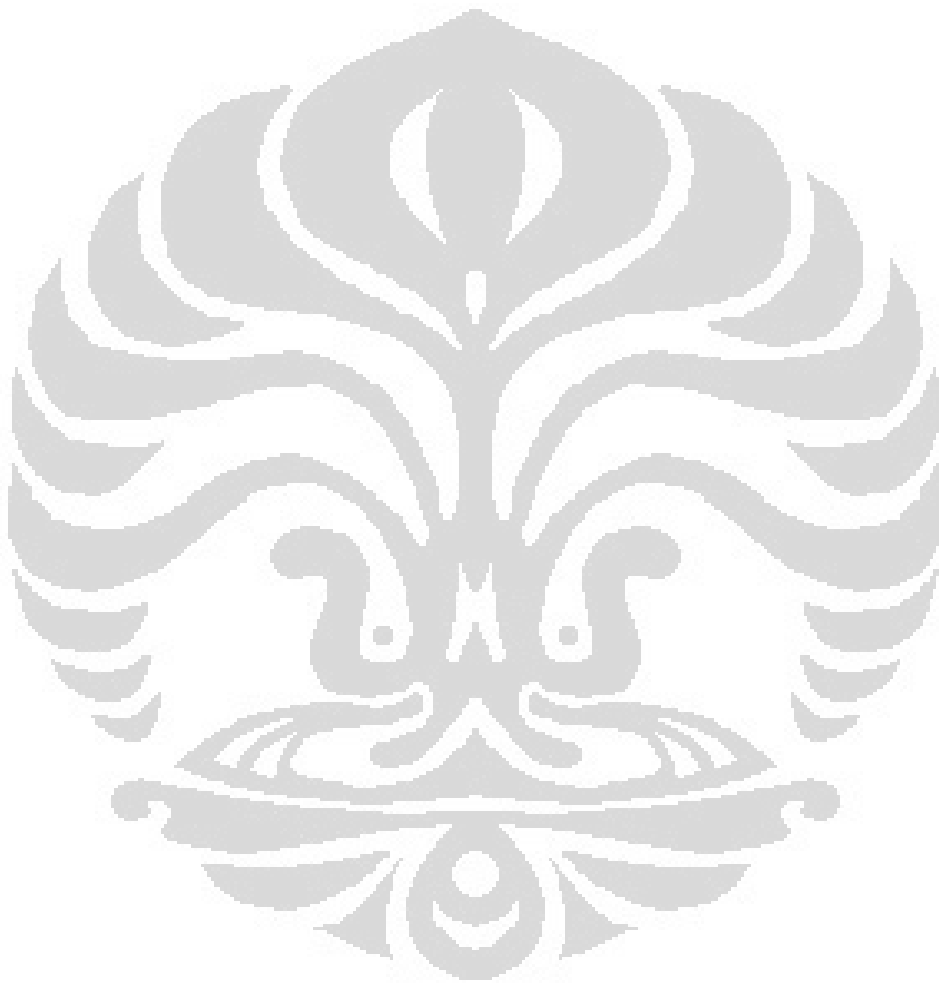
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penelitian	8
BAB 2 LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Keagenan	10
2.1.1 Asimetri Informasi	10
2.1.2 Konflik Keagenan	12
2.2 Struktur Kepemilikan	13
2.2.1 Kepemilikan Keluarga	14
2.3 <i>Disclosure</i>	15
2.3.1 Laporan Keuangan	15
2.3.2 Laporan Tahunan	17
2.3.3 Tingkat Pengungkapan.....	19
2.3.4 Motif Pengungkapan Sukarela Oleh Perusahaan	21
2.3.5 Teori Terkait Pengungkapan Sukarela Atas Pemenuhan Kebutuhan <i>Stakeholders</i>	22
2.4. <i>Good Corporate Governance</i>	23
2.4.1 <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia.....	26
2.4.2 Dewan Komisaris	28
2.4.3 Komite Audit.....	29
2.5 Hubungan antara Kepemilikan Keluarga dan Pengungkapan Sukarela ...	31
2.6 Hubungan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dengan Pengungkapan Sukarela	32
2.7 Kerangka Pemikiran	33
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Sumber Data Penelitian.....	35
3.2 Sampel Penelitian.....	35
3.3 Model Penelitian	36

3.4 Operasional Variabel.....	37
3.4.1 Variabel Dependen.....	37
3.4.2 Variabel Independen	39
3.4.3 Variabel Moderasi.....	39
3.4.4 Variabel Kontrol.....	41
3.5 Pengujian Asumsi Klasik	42
3.5.1 Uji Normalitas.....	42
3.5.2 Uji Multikolinearitas	43
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	43
3.6 Pengujian Statistik.....	43
3.6.1 Uji Koefisien determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	43
3.6.2 Uji Signifikansi F.....	44
3.6.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t).....	44
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Tingkat Pengungkapan Sukarela.....	45
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
4.3 Pengujian Hipotesis 1.....	52
4.3.1 Kepemilikan Keluarga dan Pengungkapan Sukarela	53
4.3.2 ROE, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Kualitas Audit, dan Pengungkapan Sukarela.....	53
4.4 Pengujian Hipotesis 2.....	54
4.4.1 Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Pengungkapan Sukarela	56
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	60
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	60
5.4 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

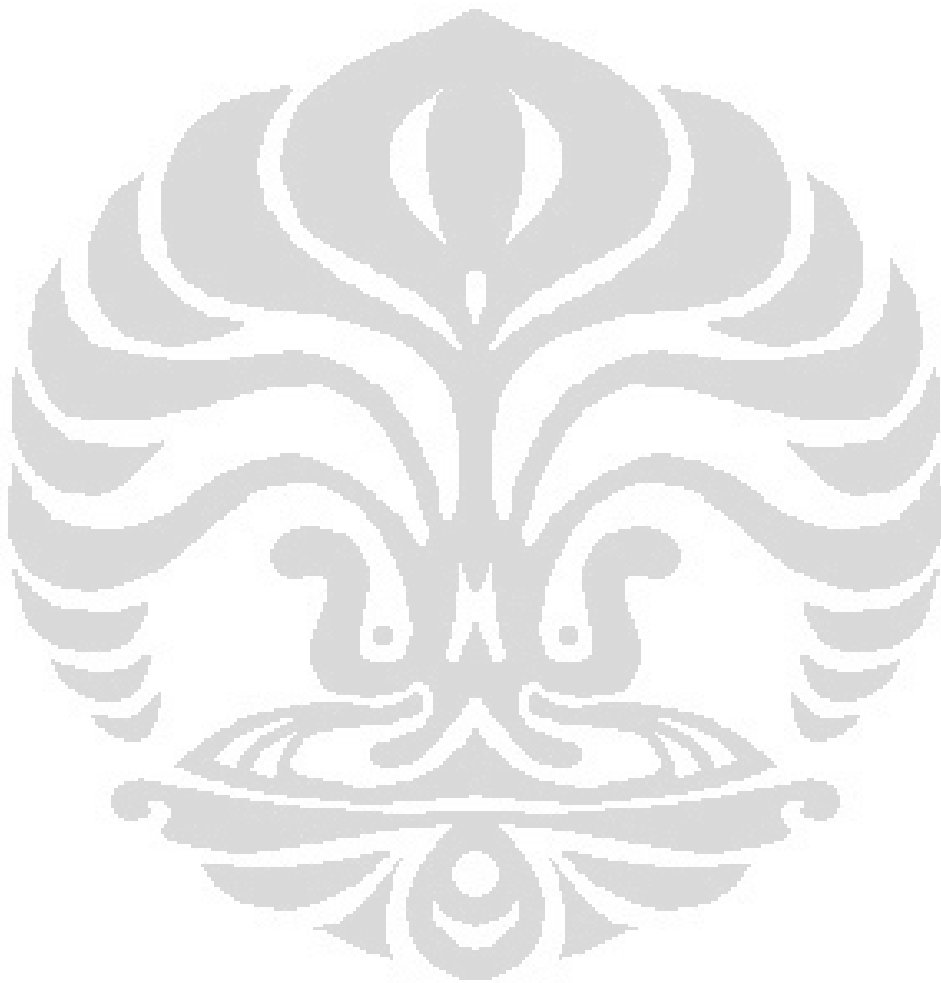
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ringkasan Prosedur Pemilihan Sampel	36
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Ekspetasi Tanda Koefisien	37
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif per Kategori Pengungkapan.....	45
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
Tabel 4.3 <i>Pearson Correlation</i> Antar Variabel Penelitian.....	50
Tabel 4.4 Hasil Regresi Berganda Atas Model 1 dan 2	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Winsorization <i>Treatment</i> Terhadap Variabel.....	65
Lampiran 2: Uji Normalitas Atas Model 1	66
Lampiran 3: Uji Multikolinearitas Atas Model 1	66
Lampiran 4: Uji White Heteroskedastisitas Atas Model 1.....	67
Lampiran 5: Uji Normalitas Atas Model 2	68
Lampiran 6: Uji Multikolinearitas Atas Model 2.....	68
Lampiran 7: Uji White Heteroskedastisitas Pada Model 2	69
Lampiran 8: Uji Reliabilitas Skoring	69
Lampiran 9: <i>Item</i> Skoring Pengungkapan Sukarela Tanpa Pembobotan.....	71
Lampiran 10: <i>Item</i> Skoring Efektifitas Dewan Komisaris.....	73
Lampiran 11: <i>Item</i> Skoring Efektifitas Komite Audit	76
Lampiran 12: Peraturan Bapepam-LK Terbaru Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik	78



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan adalah sekumpulan kontrak antara berbagai pihak yg terlibat di dalamnya. Teori tersebut menggantikan model klasik perusahaan dengan kepemilikan tunggal yang merangkap sebagai pemilik dan pengelola perusahaan (Fama, 1980). Dalam teori keagenan terdapat hubungan keagenan yaitu suatu kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dengan mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Karena pihak-pihak yang terikat dalam kontrak merupakan individu yang rasional, maka masing-masing pihak akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungannya masing-masing sehingga muncul konflik keagenan (Berle & Means, 1932)

Sebagai *agent*, manajer bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, namun di sisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, hal tersebut menyebabkan *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kuantitas dan kualitas informasi yg dimiliki oleh masing-masing pihak. Kondisi dimana manajer memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan dalam kuantitas dan kualitas yang lebih baik daripada informasi yang dimiliki oleh pemegang saham dikenal dengan istilah asimetri informasi (Scott, 2009).

Timbulnya struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan upaya untuk mempertahankan hak – hak pemilik saham dengan mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan yang mengakibatkan munculnya kontrol untuk mengatur kebijakan manajemen (La Porta et al., 1999). Kepemilikan keluarga merupakan salah satu jenis dari kepemilikan terkonsentrasi yang banyak terdapat di perusahaan publik. Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan berkepemilikan keluarga apabila pendiri atau anggota keluarganya melanjutkan posisi sebagai pemegang posisi dalam

manajemen puncak, atau termasuk sebagai anggota *board*, atau juga apabila anggota keluarga tercatat sebagai mayoritas pemilik saham dalam suatu perusahaan (Anderson, & reeb, 2003). Menurut survey yang dilakukan oleh La porta et al. (1999) terhadap struktur kepemilikan perusahaan besar yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal di 27 negara kaya, dengan menggunakan definisi kontrol 20% (perusahaan yang dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham dengan porsi kepemilikan 20% atau lebih, dianggap sebagai pemegang saham pengontrol, jika tidak ada berarti kepemilikan dianggap menyebar), ditemukan bahwa terdapat 36% perusahaan dengan kepemilikannya menyebar, 30% perusahaan yang dikontrol oleh keluarga, dan 18% perusahaan yang dikontrol oleh negara. Dari temuan tersebut tampak bahwa pada sebagian besar perusahaan besar di negara maju, terdapat kepemilikan terkonsentrasi dan yang menjadi pemegang pengendali utamanya adalah keluarga. Meskipun La porta tidak melakukan survey kepemilikan negara berkembang, diduga bahwa konsentrasi kepemilikan lebih besar bila dibandingkan dengan kepemilikan menyebar. Karena perlindungan terhadap pihak minoritas masih rendah, hal tersebut menyebabkan terhambatnya investor kecil untuk melakukan pembelian saham.

Mengenai struktur kepemilikan di Indonesia, Laporta (1983) menyimpulkan bahwa aturan hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tidak terlalu terlalu buruk, namun Indonesia termasuk negara yang paling buruk dalam hal pelaksanaan hukum. Jadi dapat diduga kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi. Dalam penelitian terhadap 9 negara di Asia timur, termasuk Indonesia, Claesens, djankovic, & lang (2000) menemukan bahwa posisi kontrol keluarga sangat tinggi, yaitu sebesar 71,5%. Pola kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi di Asia, khususnya Indonesia, menunjukkan lemahnya peran manajer dan dewan direksi dalam perusahaan. Posisi manajer dan dewan direksi telah diisi oleh pihak – pihak yang erat kaitannya dengan pemegang saham pengendali yaitu dalam hal ini pihak keluarga. Hal tersebut membuat kebijakan perusahaan dapat berada sepenuhnya di bawah kendali pemegang saham pengendali, sehingga tidak terdapat konflik keagenan di antara manajemen dengan pemegang saham. Namun

fenomena tersebut malah mengakibatkan bergesernya konflik keagenan menjadi konflik kepentingan antara pemilik saham pengendali dengan pemilik saham non-pengendali (minoritas) dikarenakan munculnya asimetri informasi (Ali et al., 2007), sehingga dapat menimbulkan rendahnya kepercayaan investor terhadap perusahaan kepemilikan keluarga sebagai pengendali.

Pada saat terjadi asimetri informasi, manajer cenderung memberikan sinyal melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi mengenai kondisi perusahaan terhadap *stakeholders* untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan (Henderson, 2004). Pengungkapan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap *stakeholders* khususnya investor dalam mengambil keputusan. Penambahan pengungkapan perusahaan dapat memberi kemampuan lebih untuk investor dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan dan manajemen sebagai pihak bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup perusahaan (Healy & Palepu, 2001). Seperti yang dikatakan oleh Diamond & Verrechia (1991), manajemen memiliki motivasi untuk melakukan pengungkapan karena adanya pandangan bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan, dapat dianggap perusahaan yang tidak baik sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan melakukan pengungkapan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan (Healy & Palepu, 2001).

Setiap tahun perusahaan yg telah *go public* menerbitkan laporan tahunannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat keputusan KEP-134/BL/2006 (lihat lampiran 12) dan Kep-40/BL/2007 yang mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan serta jangka waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan berkala bagi emiten (perusahaan publik). Laporan tahunan tersebut memuat data keuangan maupun non keuangan perusahaan publik yang dijadikan alat utama pihak manajemen untuk menunjukkan tingkat efektifitas kinerja perusahaan, dan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Suripto & Baridwan, 1999). Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan

dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib dan sukarela (Darrough 1993).

Darrough (1993) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan kebijakan manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan tahunan. Cheng & Li, (2008) berpendapat bahwa pengungkapan sukarela merupakan sarana penting untuk membedakan antara perusahaan yang baik dan yang buruk bagi investor, karena ketiadaan informasi dianggap dekat dengan berita buruk, dan pengungkapan sukarela dapat membantu investor untuk membuat keputusan menggunakan informasi di luar laporan keuangan berupa manajemen resiko, kebijakan, maupun prospek perusahaan di masa yang akan datang. Meskipun kecukupan informasi yang diterima investor sangat bergantung pada luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, namun luasnya pengungkapan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan dari perusahaan.

Pengungkapan sukarela dianggap dapat mengancam keberadaan pemegang saham terkonsentrasi (grup kepemilikan tertentu) dalam perusahaan (Diamond & Verrecchia, 1991). Hal tersebut dijelaskan oleh Anderson & Reeb (2003) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa grup pemilikan keluarga pada umumnya melakukan investasi dengan rentang waktu yang lebih lama serta berkelanjutan, sehingga pihak perusahaan cenderung tidak peduli terhadap kebutuhan informasi para *shareholders*, yang berakibat timbulnya kesulitan bagi investor dari luar perusahaan untuk masuk ke dalam perusahaan. Pemilik keluarga juga menanggung potensial beban dalam waktu jangka pendek yang dapat muncul dari pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga pengungkapan yang luas berpotensi untuk menimbulkan biaya yang ditanggung oleh pemilik perusahaan.

Bushman et al. (2004) juga menyampaikan hal yang senada, perusahaan dengan kepemilikan keluarga melakukan pembatasan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan karena pihak manajemen dan pihak pemilik keluarga sebagai pemilik saham mayoritas memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan maupun non-

keuangan sehingga pengungkapan terhadap perusahaan dianggap tidak diperlukan. Situasi ini membuat peran dari dewan komisaris dan komite audit menjadi sangat penting untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa *good corporate governance* (GCG) telah berjalan sesuai dengan struktur tata kelola perusahaan yang baik (OECD 2004).

Mekanisme GCG dapat menekan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen dengan melakukan pengendalian yang diarahkan kepada pengawasan perilaku manajer, sehingga tindakan yang dilakukan manajer sesuai dengan kepentingan seluruh pemegang saham (Monk & Minow, 2001). Penerapan GCG berupa adanya perangkat Komisaris dan Komite Audit yang efektif dalam perusahaan akan menjaga kepentingan pemegang saham secara keseluruhan, tidak hanya pemegang saham pengendali, namun juga pemegang saham minoritas. Pemerintah melalui Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mendorong setiap perusahaan publik (emiten) untuk melakukan peningkatan GCG, salah satunya melalui peraturan yang mengharuskan emiten memiliki komisaris independen dan komite audit, yang diatur dalam surat keputusan no: Kep-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik).

Prinsip GCG OECD (2004) menyebutkan bahwa dewan komisaris harus memiliki sejumlah dewan yang independen di dalam manajemen, yang dapat membuat keputusan secara independen. Keberadaan komisaris independen ini dapat menunjukkan karakteristik independensi dari dewan komisaris. Sedangkan komite audit yang merupakan komite yang berfungsi untuk membantu komisaris independen dalam melaksanakan tugasnya, yang bertanggung jawab untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, pemeriksaan atas audit internal, serta pemastian kerahasiaan informasi perusahaan. (Bapepam, Kep-29/PM/2004). Karakteristik dewan komisaris dan komite audit dalam perusahaan dapat menjadi tolak ukur bagi penentuan skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit (Hermawan, 2009).

Dahya & McConell (2005); Cheng & Curtney (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa komposisi *independent non executive director* dapat memperkuat

pengawasan terhadap kegiatan dan keputusan manajemen, dan berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela. Keberadaan komisaris independen dapat menghindari adanya pengungkapan yang rendah karena komisaris independen lebih berkeinginan untuk memperkuat kualitas pengungkapan (Forker, 1992). Sementara itu Chau & Gray (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa komisaris independen juga dapat memperlemah hubungan negatif antara kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan sukarela. Chau & Leung (2006) menyatakan bahwa *independent non executive director* melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen, dan menuntut manajemen akan keberadaan komite audit, namun kepemilikan keluarga terlalu dominan terhadap keberadaan komite audit. Sedangkan Penelitian Allegrini & Greco (2011) memaparkan peranan komite audit dalam penelitiannya dengan menjelaskan bahwa tingkat frekuensi rapat komite audit dapat menimbulkan tingginya pengungkapan sukarela perusahaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Collier (1993) yang menjelaskan bahwa komite audit dapat memastikan kualitas pelaporan laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dengan meminimalisasi penahanan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Penerapan dewan komisaris dan komite audit juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela, apabila perusahaan menganggap fungsi dari pengungkapan sukarela telah digantikan oleh mekanisme internal kontrol yang baik, sehingga perusahaan memandang tidak perlu untuk melakukan pengungkapan sukarela (Collier, 1993). Sementara itu Arshad et al. (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *independent non executive director* dengan pengungkapan sukarela karena *independent non executive director* lebih berfokus kepada pengungkapan wajib dan lebih memperhatikan sistem akuntansi pada perusahaan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin membuktikan apakah perusahaan publik di Indonesia memiliki karakter yang sama dengan karakter perusahaan di dalam pembahasan jurnal Chau & Gray (2010) dengan melihat apakah kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, dan apakah efektifitas dewan komisaris dan komite

audit dapat mempengaruhi hubungan antara kepemilikan keluarga dengan pengungkapan sukarela. Penelitian ini mengadaptasi *proxy* yang digunakan oleh Chau & Gray (2010) dengan mengganti *proxy independent chairman* dan *proxy proporsi independent non-executive director* menjadi *proxy* efektifitas dewan komisaris dan *proxy* efektifitas komite audit yang digunakan dalam penelitian Hermawan (2009). Penelitian ini juga dengan mengganti item pengukuran indeks pengungkapan sukarela pada *proxy* pengungkapan sukarela dengan menggunakan item pengukuran pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian Adhariani (2006). Sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang serupa dan dipublikasikan secara umum seperti yang penulis lakukan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis menyajikan garis besar permasalahan agar penyusunan skripsi menjadi lebih fokus dan terarah, yang akan dibahas dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga (*family ownership*) terhadap tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) ?
2. Bagaimana efektifitas dewan komisaris dan komite audit dapat mempengaruhi hubungan antara pengaruh kepemilikan keluarga (*family ownership*) terhadap tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan keluarga (*family ownership*) terhadap tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit dapat mempengaruhi hubungan antara kepemilikan keluarga (*family ownership*) dengan tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan melalui pembuktian empiris mengenai dampak dari kepemilikan keluarga dan efektifitas dewan komisaris serta komite audit terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan publik di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak manajemen untuk menunjukkan pentingnya pengungkapan sukarela dan penerapan GCG pada perusahaan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor sebagai bahan pertimbangan dasar pengambilan keputusan dalam pemberian investasi kepada perusahaan.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder perusahaan industri manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009 hingga 2010.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

Bab 2 Landasan Teori

Menjelaskan pokok landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi teori tentang kepemilikan keluarga (*family ownership*), pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), dan GCG serta teori-teori lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Bab 3 Metodologi Penelitian

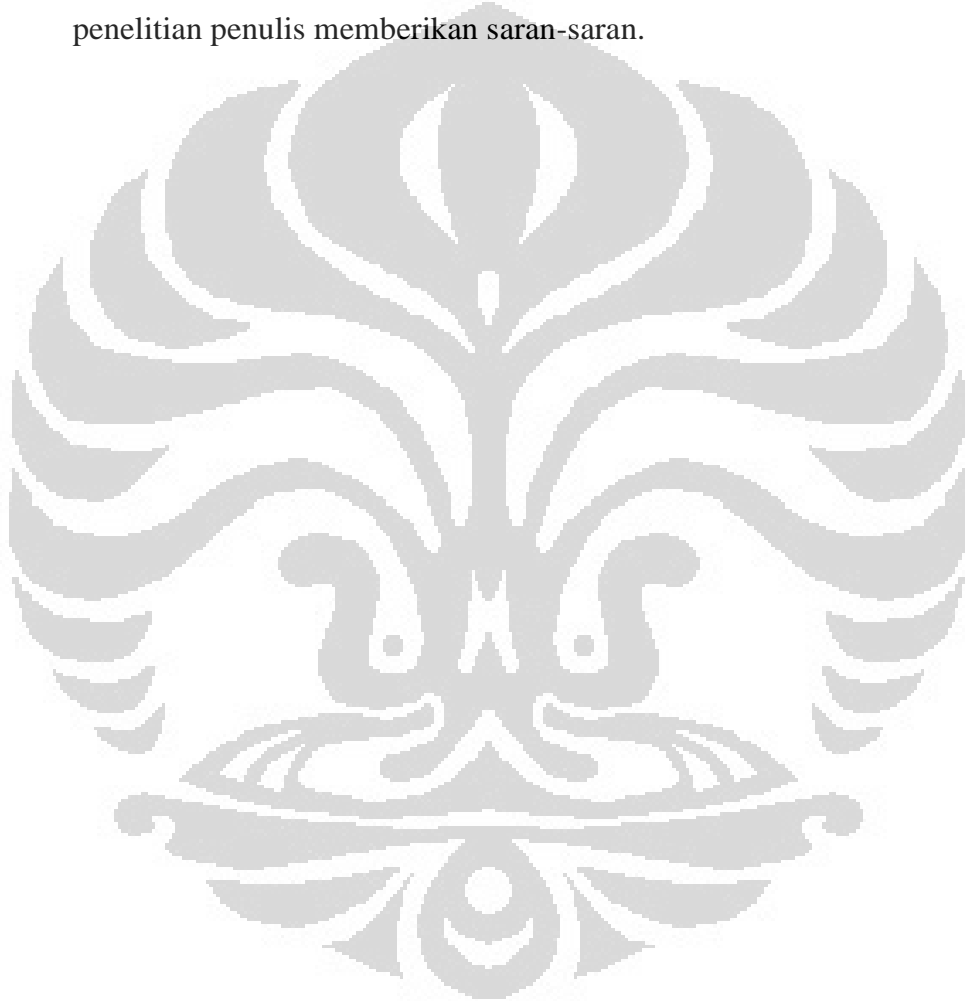
Menjelaskan waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab 4 Analisis dan Pembahasan

Membahas gambaran umum objek penelitian, analisis data, pembahasan, tentang pengujian hipotesis, serta implikasi uji hipotesis.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan hasil analisis, dan uji hipotesis yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan penelitian ini, kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan bagian penting dari hubungan kontraktual yang mendasari teori perusahaan (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan bahwa perusahaan merupakan kesatuan dari hubungan kontraktual antar faktor produksi, seperti pegawai, *suppliers*, *customers*, *creditors*, dan lain sebagainya. Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa terdapat pemisahan antara investor dan pengelola modal (manajer) di dalam perusahaan, dan menggantikan model klasik perusahaan dengan satu pemilik yang sekaligus mengelola perusahaan (Fama, 1980). Hubungan keagenan muncul pada saat pemegang saham perusahaan (pemilik) memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham melalui hubungan kontraktual, atau *agency relationship* (Jensen & Meckling, 1976). *Agent* terdiri dari beberapa orang tenaga profesional yang dikontrak oleh pemilik untuk bekerja secara optimal dalam memenuhi segala kepentingan para pemilik dan agen wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya terkait dengan pengelolaan perusahaan kepada pemilik.

2.1.1 Asimetri Informasi

Sebagai pihak yang melakukan pengelolaan perusahaan, manajer tentunya memiliki informasi mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan yang lebih baik daripada pemilik perusahaan. Oleh karena itu, manajemen memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang perusahaan secara akurat, relevan, dan tepat waktu melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan perusahaan. PSAK No. 1 (2009) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Penyimpangan dari pengungkapan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu membuat informasi tidak dapat

memenuhi kepentingan pengguna informasi. Hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan investasi oleh pemilik perusahaan yang didasari oleh informasi yang diperolehnya. Kondisi perolehan informasi yang tidak seimbang antara manajemen sebagai penyedia informasi dengan *stakeholders* khususnya investor selaku pengguna informasi merupakan kondisi yang disebut dengan asimetri informasi.

Scott (2009) mengategorikan asimetri informasi secara umum menjadi dua tipe, yaitu:

1. *Adverse selection*

Asimetri informasi terjadi karena manajer dan pihak dalam lainnya mengetahui lebih banyak informasi daripada investor (pihak luar) mengenai informasi keadaan saat ini dan prospek masa depan perusahaan. Hal ini akan mendorong manajer untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari informasi tersebut dan menjadikan beban bagi para investor, contohnya dengan melakukan pembiasan atau manipulasi informasi keuangan yang diberikan kepada investor.

2. *Moral hazard*

Asimetri informasi terjadi akibat pemisahan antara pengendalian dan kepemilikan sehingga pemilik saham dan kreditur tidak dapat secara efektif mengukur tingkat atau kualitas pemenuhan tanggung jawab dari para manajer. Hal ini mendorong manajer untuk melakukan penyimpangan dari tanggung jawab dan menyalahkan hal – hal di luar kendali mereka sebagai penyebab dari kemunduran kinerja perusahaan. Laba mencerminkan kinerja dari manajer, sehingga kompensasi dan reputasi manajer secara langsung maupun tidak langsung bergantung kepada laporan laba (Scott, 2009). Ketergantungan ini membuat manajer menolak kebijakan akuntansi yang akan mengurangi kemampuan dari laporan laba dalam mencerminkan kinerja manajer. Namun, hal itu dapat mendorong manajer melakukan pembiasan atau manipulasi laporan laba untuk meningkatkan kompensasi serta reputasi manajer. Manajer akan mencoba memindahkan kekayaan pemilik saham kepada

dirinya dengan lebih – lebihkan informasi performa keuangan (dan sebagai konsekuensinya meningkatkan harga saham) di dalam masa jabatannya (LaFond & Watts, 2008). Hal ini sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia, yaitu manusia akan cenderung melakukan rasionalisasi untuk mementingkan diri sendiri dengan informasi yang mereka miliki (Eisenhardt, 1989).

2.1.2 Konflik Keagenan

Asimetri informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan sebagai agen dalam hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan agen karena adanya perbedaan kepentingan dan masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing (Jensen & Mckling, 1976). Alijoyo & Zaini (2004), memaparkan bahwa konflik keagenan dapat timbul dalam hal – hal berikut :

1. *Moral Hazard*

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

2. *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih memilih distribusi kas yang lebih tinggi melalui peluang investasi internal yang positif.

3. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi yang aman secara pribadi dan masih dalam batas kemampuan dalam mengambil keputusan investasi. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah risiko bagi perusahaan walaupun mungkin hal itu bukan pilihan terbaik bagi perusahaan.

4. *Time – Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan di dalam masa jabatan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan

Pemilik perusahaan akan selalu berusaha untuk menghilangkan adanya perbedaan kepentingan dengan agen dengan cara memberikan insentif yang sesuai, serta melakukan pengawasan untuk membatasi tindakan *agent* agar *agent* tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan kepentingan pemilik perusahaan. Walaupun begitu, *agent* tetap dapat melakukan pembuatan keputusan yang tidak memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham karena *agent* dapat melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan kebijakan – kebijakan yang disampaikan oleh pemilik perusahaan (Wallace & Zinkin, 2005). Hal – hal tersebut diatur di dalam hubungan kontraktual antara pemilik dan manajer (*agent*) sehingga hubungan kontraktual perusahaan dapat menjadi alat untuk mengurangi perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Biaya – biaya yang timbul sebagai akibat dari usaha pemilik untuk mengurangi konflik kepentingan dinamakan biaya keagenan.

2.2. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan merupakan susunan dari kepemilikan atas pengendalian suatu perusahaan. Kepemilikan atas suatu perusahaan dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham perusahaan yang ada pada pemegang saham, dan atas kepemilikan ini terdapat hak – hak yang dapat diterima oleh pemegang saham. Hak pemegang saham berupa wewenang untuk terlibat dalam penentuan arah kebijakan perusahaan menjadi landasan bagi upaya pengendalian oleh pemegang saham, sedangkan struktur kepemilikan perusahaan yang menyebar dapat menyebabkan pengendalian perusahaan berada dibawah kendali manajer karena pemilik perusahaan tidak mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajer (Shleifer & Vishny, 1986).

Namun saat ini, La Porta et al (1998) mengungkapkan suatu kondisi lewat penelitiannya yaitu kepemilikan perusahaan, umumnya terkonsentrasi hanya pada beberapa pemegang saham. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki konsentrasi kepemilikan tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Namun dari sisi tatakelola perusahaan, Indonesia masih tergolong buruk (Dharwadkar, George, & Brandes, 2000). Lemahnya perlindungan hukum dan

lingkungan dianggap berkaitan sangat erat dengan kepemilikan yang terkonsentrasi (La Porta et al, 1998).

Kang & Sorensen (1999) menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe kepemilikan dalam perusahaan modern. Dalam perusahaan modern ini, terdapat pemilik saham dalam jumlah besar yang memiliki perilaku berbeda satu sama lain. Para pemegang saham dalam jumlah besar ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

2.2.1. Kepemilikan Keluarga

Kontrol atas kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan menyebabkan suatu perusahaan disebut dengan perusahaan keluarga. Terdapat beberapa definisi atas perusahaan keluarga. Maury (2006) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan dengan kepemilikan saham individu, keluarga, atau perusahaan yang tidak terdaftar di pasar modal dengan persentase kepemilikan minimal 10%. Vilallonga & Amit (2006) mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang pemiliknya atau anggota keluarga kandung atau dari perkawinan pemiliknya adalah anggota direksi manajemen atau pemilik dari minimal 5% ekuitas perusahaan, baik secara individual maupun kelompok. Barth et al (2005) mengklasifikasikan perusahaan keluarga adalah perusahaan yang saham kepemilikannya dimiliki oleh suatu keluarga minimal sebesar 33%. Sedangkan Anderson dan Reeb (2003) menetapkan perusahaan keluarga sebagai perusahaan dimana pendirinya atau generasi penerusnya memegang kendali sebagai CEO dalam board atau sebagai pemilik saham terbesar pada suatu perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki kontrol yang kuat atas manajemen. Kontrol kepemilikan yang tinggi menyebabkan hak voting yang tinggi pada pengangkatan direktur, atau komisaris sehingga dapat mengancam pemegang saham minoritas (Morck, 1998).

Pada penelitian ini, definisi yang digunakan adalah salah satu dari definisi kepemilikan yang ditetapkan oleh Arifin (2005) yaitu keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat dalam kepemilikan perusahaan sebesar 20%

kecuali perusahaan public, Negara, dan institusi keuangan (seperti lembaga investasi, reksadana, asuransi, pension, dan bank). Perusahaan yang tidak terdaftar biasanya dimiliki secara tertutup atau terbatas sehingga sering dianggap sebagai salah satu bentuk pengendalian oleh keluarga (Faccio dan Lang, 2002 dalam Maury, 2006).

Sedangkan batas 5% digunakan sebagai *cut-off* pencantuman nama pemegang saham dalam laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Industri Manufaktur yang dikeluarkan BAPEPAM melalui surat edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002.

2.3 Disclosure

Pengungkapan informasi adalah pemberian informasi, baik informasi positif maupun informasi negatif oleh suatu perusahaan yang dapat memberikan pengaruh atas suatu keputusan investasi (Downes & Goodman, 1999). *Disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan informasi, apabila pengungkapan informasi dapat memberikan manfaat bagi *shareholders*, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengungkapan tersebut tercapai (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Investor dapat melihat informasi terkait dengan kondisi dan kinerja perusahaan dan memberikan penilaian terhadap perusahaan sebelum melakukan keputusan investasi. Perusahaan memandang pentingnya pengungkapan karena perusahaan juga membutuhkan dana dari investor untuk mengembangkan usahanya (Healy & Palepu, 2001). Diamond & Verrechia (1991) mengatakan bahwa manajemen memiliki motivasi untuk melakukan pengungkapan karena adanya pandangan bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan, dapat dianggap perusahaan yang tidak baik sehingga dapat menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan.

2.3.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang bertujuan untuk memberikan informasi

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 1 revisi 2009).

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1 (revisi 2009) menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Investor, yang berkepentingan dengan resiko dan hasil dari investasi yang mereka lakukan. Investor membutuhkan informasi untuk menentukan apakah mereka harus menahan atau menjual investasi tersebut, serta melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.
2. Karyawan, yang membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, dan kemampuan memberi balas jasa, manfaat pension, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi pinjaman, yang menggunakan informasi akuntansi untuk membantu mereka memutuskan apakah pinjaman beserta bunga dapat dibayar pada waktu jatuh tempo.
4. Pemasok, dan kreditur usaha lainnya, yang membutuhkan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha, berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada daripada pemberi pinjaman.
5. Pelanggan, yang berkepentingan dengan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan terutama bagi mereka yang memiliki perjanjian jangka panjang dengan perusahaan.
6. Pemerintah, yang berkepentingan dengan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat, yang berkepentingan dengan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta berbagai aktivitas yang menyertainya.

Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan, serta berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Manajemen juga memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi, serta memberikan informasi tambahan di dalam laporan keuangan. Wolket *et al.* (2001) mengemukakan bahwa terdapat pengungkapan yang dapat menjadi informasi pelengkap dalam laporan pengguna laporan keuangan berupa:

1. catatan kaki,
2. peristiwa setelah pelaporan,
3. analisis manajemen tentang operasi yang akan datang,
4. peramalan keuangan dan operasi,
5. laporan keuangan tambahan.

2.3.2 Laporan Tahunan

Berbeda dengan laporan keuangan yang hanya memuat informasi keuangan, laporan tahunan menyajikan data keuangan maupun non keuangan perusahaan publik yang dijadikan alat utama pihak manajemen untuk menunjukkan tingkat efektifitas kinerja perusahaan, dan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan terhadapnya (Suripto & Baridwan, 1999). Laporan tahunan merupakan suatu instrumen yang diterbitkan oleh emiten yang berisikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, dan di dalamnya terdapat informasi tambahan mengenai perusahaan, produknya, serta informasi lain yang berkaitan dengan usaha perseroan selama satu tahun (Johar Arifin et al, 1999). Emiten yang telah melakukan penawaran umum dan tergolong dalam perusahaan publik wajib menerbitkan laporan tahunan (Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006).

Laporan tahunan merupakan media pelaporan keuangan oleh pihak manajemen. Needles et al (1995) menjelaskan bahwa terdapat tujuh komponen utama di dalam laporan tahunan, yaitu:

1. Sambutan kepada para pemegang saham

Dalam bagian awal laporan tahunan, terdapat sambutan dari direktur utama perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham. Direktur utama selaku perwakilan dari pihak manajemen juga menguraikan tentang kinerja selama satu periode usaha dan prospek perusahaan di tahun mendatang

2. Ikhtisar data keuangan

Perusahaan melakukan penyajian data keuangan penting selama 10 tahun terakhir yang dilengkapi grafik dengan tujuan mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat tren aktifitas perusahaan, seputar tingkat penjualan bersih, data non keuangan.

3. Laporan Keuangan

Pihak manajemen mencantumkan empat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan arus kas. Laporan Keuangan tersebut terdiri beberapa periode usaha, agar pengguna laporan tahunan dapat melakukan perbandingan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja perusahaan tahun sebelumnya. Khusus untuk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan, harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi.

4. Catatan atas laporan keuangan

Untuk membantu pemakai laporan tahunan menginterpretasikan data, perusahaan harus mencantumkan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan, yang berisi seputar prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, catatan penjelas atas item yang terdapat di laporan keuangan, dan informasi pelengkap atas informasi yang tersedia di laporan keuangan

5. Laporan pertanggungjawaban manajemen

Laporan pertanggungjawaban manajemen merupakan pernyataan manajemen yang menegaskan bahwa tanggung jawab atas laporan keuangan yang telah diaudit dan struktur pengendalian internal sepenuhnya dipegang oleh manajemen.

6. Hasil diskusi dan analisa manajemen

Pihak manajemen melaporkan hasil dari pembahasan dan analisis manajemen atas kondisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan, serta melakukan perbandingan dengan kinerja perusahaan di masa lalu. Pihak manajemen juga menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan pada periode berjalan.

7. Laporan hasil audit

Auditor melakukan audit secara independen terhadap perusahaan, yang kemudian menerbitkan opini audit atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Opini audit atas perusahaan disajikan bersama laporan keuangan sebagai bukti bahwa laporan keuangan tersebut sudah diaudit.

Sedangkan menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006, laporan tahunan yang diterbitkan oleh emiten wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.

2.3.3 Tingkat Pengungkapan

Hendriksen (2001) dalam penelitiannya menyebutkan tiga konsep pengungkapan yang umumnya dikemukakan sebagai berikut:

1. *Adequate disclosure*

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Dalam hal ini *adequate disclosure* mengandung arti pengungkapan yang minimal harus ada sehingga tidak menyesatkan *stakeholders*.

2. *Fair disclosure*

Pengungkapan yang wajar merupakan salah satu tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan

keuangan dengan memberikan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3. *Full disclosure*

Berarti penyajian semua informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, full disclosure berarti penyajian informasi secara melimpah sehingga disclosure menjadi tidak tepat. Informasi yang terlalu melimpah akan menyembunyikan informasi penting dan membuat laporan keuangan sulit untuk diinterpretasikan.

Pengungkapan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai aktivitas suatu unit usaha. Informasi yang diungkapkan harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan (Halim, Meiden, dan Tobing, 2005). Sedangkan Healy & Palepu (2001) menyatakan bahwa tersebarnya informasi yang berkaitan dengan strategi bisnis dan rencana perusahaan dapat merugikan posisi perusahaan sendiri terhadap kompetitor.

Terciptanya tingkatan pengungkapan dipengaruhi oleh keluasan pengungkapan sukarela, dikarenakan perusahaan diasumsikan sudah melakukan pengungkapan minimum yang sudah diwajibkan, sehingga penambahan informasi dilakukan melalui pengungkapan sukarela. Darrough (1993) dalam penelitiannya mengemukakan dua kategori jenis pengungkapan yang berkaitan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standard yang berlaku, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib

Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standard akuntansi yang berlaku, yang diatur dalam peraturan akuntansi maupun peraturan pemerintah.

2. Pengungkapan sukarela

Merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy & Palepu (1993) menjelaskan disamping perusahaan publik wajib untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka juga melakukan pengungkapan sukarela

untuk memberi tambahan informasi kepada *stakeholders*. Jumlah tambahan informasi yang diungkapkan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan sukarela secara lebih luas agar investor dapat memahami strategi bisnis perusahaan.

2.3.4 Motif Pengungkapan Sukarela Oleh Perusahaan

Terdapat beberapa motif perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela menurut Healy & Palepu (2001), yaitu:

1. *Capital market transaction hypothesis*

Karena adanya rencana perusahaan menerbitkan saham, surat hutang, atau instrument modal lain. Perusahaan mencoba menciptakan persepsi baik di mata investor dengan melakukan pengungkapan sukarela yang luas. Myers & Majluf (1986) mengatakan bahwa asimetri informasi dapat menghilangkan kepercayaan investor thdp manajemen, dan menyebabkan biaya pendanaan eksternal meningkat.

2. *Corporate control contest hypothesis*

Dewan komisaris dan pemilik modal menyerahkan tanggung jawab kinerja saham perusahaan kepada manajemen. Warner & Weinsbach (1988) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela dapat meminimalisasi pergantian CEO atas buruknya performa perusahaan, karena pengungkapan sukarela dapat menjelaskan alasan yang mendasari hal tersebut.

3. *Stock compensation hypothesis*

Pengungkapan sukarela diharapkan dapat mengevaluasi nilai saham yang *undervalued* dan meningkatkan likuiditas saham perusahaan, sekaligus menurunkan biaya kontrak terkait dengan kompensasi saham.

4. *Litigation cost hypothesis*

Aspek hukum berpengaruh dalam keputusan pengungkapan sukarela oleh pihak manajemen. Ketika hukum dan peraturan menuntut perusahaan utk

melakukan pengungkapan sukarela pada tingkat dan waktu tertentu. Perusahaan dapat menurunkan risiko terkena tuntutan hukum.

5. *Management talent signaling hypotesis*

Truman (1986) berpendapat bahwa manajer dengan kemampuan baik memiliki kecenderungan untuk melakukan *forecast* kedepan, sehingga investor dapat menyimpulkan bahwa manajer memiliki strategi yang jitu untuk membawa perusahaan menghadapi situasi di masa yang akan datang.

6. *Propietary cost hypothesis*

Verrechia (1983) menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela pada perusahaan, dipengaruhi oleh lingkungan dan industri perusahaan tersebut, karena adanya tingkat persaingan antar perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis lintas industri cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang hanya melakukan kegiatan bisnis pada satu industri.

2.3.5 Teori Terkait Pengungkapan Sukarela Atas Pemenuhan Kebutuhan Stakeholders

Pengungkapan Sukarela dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi yang beraneka ragam. Henderson (2004) memaparkan bahwa terdapat beberapa teori yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan *stakeholders* dan perusahaan dengan media informasi pengungkapan sukarela, yaitu:

1. *Signalling Theory*

Teori ini menyatakan bahwa pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sinyal bagi pasar. Dengan pengungkapan secara sukarela yang cukup, maka kredibilitas perusahaan akan tetap terjaga. Karena, menyembunyian informasi akan menimbulkan persepsi yang salah dan menyesatkan yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan oleh para investor (Francis et al, 2008). Pengungkapan informasi yang minim cenderung diasumsikan dengan sinyal buruk oleh pasar (Blaccioniare, & Patten, 1994)

2. *Political Theory*

Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan dapat menanggung biaya tambahan (*political cost*) yang muncul dalam praktek bisnis seperti biaya pajak, permintaan kenaikan gaji karyawan, kerugian atas inefisiensi operasional perusahaan, maupun dampak perusahaan terhadap lingkungan. Ness & Mirza (1991) mengatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan lebih luas, untuk mengurangi adanya *political cost* terhadap pihak-pihak tertentu yang erat kaitannya dengan perusahaan.

3. *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi mengatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995).

4. *Stakeholder Theory*

Teori ini menyebutkan bahwa tingkat kepentingan *stakeholders* yang beragam mempengaruhi operasi dan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus mengidentifikasi kepentingan *stakeholders* untuk dapat menjalankan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan membina hubungan baik dengan para *stakeholders* (Freeman, 1983).

2.4 *Good Corporate Governance*

Menurut *Organization of Economic Corporation and Development (OECD)*, Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang bertujuan agar kegiatan bisnis perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol. Struktur tata kelola menekankan pada pembagian atas hak dan kewajiban diantara para

pemangku kepentingan yang berbeda dalam suatu perusahaan seperti direksi, manajer, pemilik saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan menyatakan berbagai aturan serta prosedur untuk membuat keputusan mengenai urusan perusahaan, dan juga memberikan arahan melalui tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan serta pemantauan kinerja.

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) merupakan suatu organisasi yang turut menyorot *issue* seputar *corporate governance*. OECD juga mengeluarkan pedoman *corporate governance* yang baik berupa prinsip-prinsip *corporate governance* yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. *Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework.*

Kerangka *corporate governance* harus mendukung adanya transparansi dan efisiensi pasar, harus konsisten dengan hukum yang berlaku dan secara jelas mengatur adanya pemisahan tanggung jawab antara pengawas, pihak yang membuat suatu kebijakan dan pihak yang menegakkan peraturan.

2. *The Rights of Shareholders and Key Ownership Function.*

Adapun hak-hak pemegang saham yang dimaksud adalah hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan; (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya; (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur; (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham; (5) memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. Kerangka yang dibangun dalam suatu negara mengenai *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak tersebut.

3. *The Equitable Treatment of Shareholders.*

Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan (*re-dress*) atas pelanggaran

dari hak- hak pemegang saham. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek- praktek perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan mengharuskan anggota Direksi untuk melakukan keterbukaan apabila menemukan transaksi- transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kerangka yang dibangun oleh suatu negara mengenai *corporate governance* harus mampu menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing.

4. *The Role of Stakeholders in Corporate Governance.*

Kerangka yang dibangun di suatu negara mengenai *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholder seperti yang ditentukan dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk mekanisme yang mengakomodasi peran *stakeholders* dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan juga diharuskan membuka akses informasi yang relevan bagi kalangan *stakeholders* yang ikut berperan dalam proses *corporate governance*.

5. *Disclosure and Transparency.*

Kerangka yang dibangun di suatu negara mengenai *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam pengungkapan informasi ini termasuk adalah informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Di samping itu informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen perusahaan

juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan perusahaan untuk memberikan jaminan atas penyusunan dan penyajian informasi.

6. *The Responsibilities of the Board.*

Kerangka yang dibangun di suatu negara mengenai *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.4.1 *Good Corporate Governance di Indonesia*

Berkembangnya *corporate governance* secara luas di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai organisasi yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan, peneliti, maupun praktisi yang berfokus pada penerapan *corporate governance*. Hal tersebut dimulai dari pemerintah yang membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999 yang terus melakukan pembenahan sampai akhirnya pada tahun 2004 KNKCG berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pembentukan KNKG bertujuan untuk memberikan acuan kepada perusahaan untuk melaksanakan GCG dengan menerapkan standar minimal yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam membuat manual yang lebih operasional dalam menerapkan praktek *Good Corporate Governance* (GCG). Dari pihak regulator, pembentukan pedoman GCG berfungsi sebagai acuan dalam menyusun peraturan terkait serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi atas penerapan pedoman GCG (KNKG, 2006)

Pada tahun 2000, 5 asosiasi bisnis dan profesi yaitu Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Ikatan akuntan Indonesia – Kompartemen akuntan Manajemen (IAI-KAM), the *Indonesian Financial Executives Assocation* (IFEA), the *Indonesian Netherlands Association* (INA), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) membentuk Forum fo *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang bekerja sama dan berpartisipasi dalam menciptakan dan mengembangkan *coporate governance* di

Indonesia. FCGI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mensosialisasikan prinsip dan aturan mengenai *corporate governance* kepada dunia bisnis di Indonesia dengan mengacu kepada *international best practices* sehingga sehingga dapat tercipta manfaat dalam pelaksanaan prinsip dan aturan yang sesuai dengan *good corporate governance* (FCGI, 2002)

Selain KNKG dan FCGI, di Indonesia juga berdiri lembaga nirlaba bernama Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD) yang didirikan oleh 10 Universitas dan sekolah bisnis terkemuka yang merupakan penyedia jasa advokasi, pelatihan, dan riset dalam bidang tata kelola perusahaan di Indonesia. Dalam penilaiannya terhadap perusahaan publik di Indonesia pada tahun 2008, IICD mengungkapkan bahwa terdapat 16,67% perusahaan yang belum menjalankan praktek *good corporate governance*, sedangkan 83,33% sisanya dianggap memenuhi persyaratan minimum praktek GCG, yang 16,67% di antaranya masuk dalam kategori buruk (di bawah 60%). Sementara itu, IICD juga menjabarkan skor rata-rata penilaian atas penerapan CG pada 3 tahun penilaian di Indonesia, yaitu 61,26% pada tahun 2005; 64,96% pada tahun 2007; dan 66,50% pada tahun 2008 (skor rata-rata termasuk dalam kategori *fair*, 60-79%). Pergerakan skor pada 3 tahun tersebut menunjukkan adanya perbaikan mengenai penerapan CG di Indonesia, namun penerapan CG masih dalam kategori *fair*. Skor penerapan CG sebesar 66,50% pada tahun 2008 terdiri dari skor penilaian terhadap masing-masing prinsip CG menurut IICD, yaitu 50,60% untuk perlindungan hak pemegang saham; 87,16% untuk perlakuan adil terhadap pemegang saham; 65,73% untuk peran pemangku kepentingan; 72,76% untuk pengungkapan dan transparansi; dan 60,68% untuk tanggung jawab dewan komisaris dan direksi (investasi.kontan.co.id).

World Bank juga melakukan penelitian dan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip OECD tentang *corporate governance* di berbagai negara termasuk Indonesia yang dilaporkan melalui *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin akan menyebabkan kerentanan ekonomi dan keuangan terhadap suatu negara, serta untuk mengetahui tolak ukur penilaian terhadap hukum dan kerangka umum

peraturan di suatu negara; praktek, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. ROSC Indonesia pada tahun 2009 memaparkan bahwa skor rata-rata penilaian atas penerapan CG di Indonesia adalah sebesar 65% (skor rata-rata termasuk dalam kategori *partially implemented*, 35-75%). Skor penerapan CG terdiri dari skor penilaian terhadap masing-masing prinsip CG yang memakai pendekatan OECD, yaitu 72% untuk *enforcement & institutional framework*; 72% untuk *shareholder rights & ownership*; 75% untuk *equitable treatment of shareholders*; 70% untuk *equitable treatment of stakeholders*; 73% untuk *disclosure & transparency*; dan 66% untuk *board responsibilities*. Berdasarkan skor yang didapat, Indonesia masih berada di bawah India, Malaysia, dan Thailand, dan masih berada di atas Philipina dan Vietnam dalam penerapan *good corporate governance*. Sedangkan kelemahan yang paling terlihat terhadap penerapan prinsip CG di Indonesia terdapat di penerapan pada prinsip *board responsibilities* (ROSC, 2010).

2.4.2 Dewan Komisaris

Pedoman Umum GCG Indonesia oleh KNKG (2006), menyatakan bahwa dewan komisaris adalah sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG dengan baik. UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mendefinisikan dewan komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. KNKG menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif jika terpenuhinya prinsip – prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan

kepentingan semua pemangku kepentingan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan pemberhentian sementara.

Dalam struktur perusahaan, Dewan Komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, yang dikenal sebagai Komisaris Independen. Terafiliasi berarti pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Penerapan *corporate governance* membutuhkan adanya komisaris independen agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif. Beasley (1996) dalam Hermawan (2009) menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan dalam laporan keuangan. UUPT pasal 120 menyatakan bahwa anggaran dasar perseroan dapat mengatur 1 (satu) atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan dan oleh karenanya keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi. Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa (Lampiran II Kep-305/BEJ/07-2004) menyatakan bahwa komisaris independen wajib ada di dalam dewan komisaris perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut komisaris independen harus secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

2.4.3 Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK No.339/BEJ/07-2001, dinyatakan bahwa seluruh perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib memiliki komite audit, hal ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap

investor dengan memaksimalkan pemeriksaan dan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Definisi komite audit menurut Surat keputusan Bapepam-LK Nomor Kep.29/PM/2004 yaitu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam membantu fungsi dewan komisaris, komite audit harus memastikan bahwa:

- Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
- Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
- Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
- Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Komite audit merupakan penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Fungsi komite audit adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan manajemen
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif memberikan penilaian independen dan memainkan peranan yang positif
4. Membantu direktur keuangan dengan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pokok – pokok persoalan yang penting dan sulit untuk dilaksanakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi atas pokok – pokok persoalan penting dengan efektif
6. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap pengendalian internal yang lebih baik.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit.

Anggota komite berasal dari dewan komisaris, komisaris independen perusahaan menjadi ketua komite audit. Latar belakang pengetahuan tentang keuangan dan pengalaman anggota komite audit akan mempengaruhi efektifitas peran pengawasan oleh komite audit. Seperti yang diatur dalam peraturan Bapepam-LK bahwa minimal 1 (satu) orang anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan atau keuangan. Abbott et al. (2004) menemukan bukti bahwa terdapat hubungan negatif antara pengalaman yang dimiliki oleh anggota komite audit terhadap earnings restatement pada laporan keuangan.

2.5 Hubungan antara Kepemilikan Keluarga dan Pengungkapan Sukarela

Teori kepemilikan keluarga memaparkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung memiliki kontrol yang kuat terhadap manajemen sehingga tidak terdapat konflik keagenan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Namun muncul masalah lain dalam perusahaan kepemilikan keluarga, yaitu timbulnya asimetri informasi antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas, karena manajer sudah tidak independen dan didominasi oleh pihak pemilik keluarga (Ali et al. 2007). sehingga dapat menimbulkan rendahnya kepercayaan investor terhadap perusahaan kepemilikan keluarga sebagai pengendali.

Pada saat terjadi asimetri informasi, manajer cenderung memberikan sinyal melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi mengenai kondisi perusahaan terhadap *stakeholders* untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan (Henderson, 2004). Pengungkapan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap *stakeholders* khususnya investor dalam mengambil keputusan. Penambahan pengungkapan perusahaan dapat memberi kemampuan lebih untuk investor dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup perusahaan (Healy & Palepu, 2001).

Akan tetapi, pemberian informasi yang berlebih dalam bentuk pengungkapan sukarela dapat mengancam keberadaan pemegang saham keluarga. Perusahaan dengan

kepemilikan keluarga menanggung potensial beban jangka pendek yang dapat muncul dari pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh manajemen, yang menyebabkan perusahaan kepemilikan keluarga melakukan pembatasan terhadap pengungkapan sukarela.

Hipotesis 1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela dalam perusahaan.

2.6 Hubungan Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dengan Pengungkapan Sukarela

Dewan komisaris dan komite audit dalam tata kelola perusahaan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam pelaksanaan strategi pengelolaan, pengelolaan perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Kinerja pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit yang efektif akan mengurangi kemungkinan manajemen melakukan penyimpangan yang dapat merugikan *stakeholders* khususnya pemegang saham minoritas.

Dengan keberadaan dewan komisaris dan komite audit, perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen, pemilik perusahaan, pemegang saham minoritas, dan *stakeholders* lainnya dengan menuntut pengungkapan yang lebih luas dalam bentuk pengungkapan sukarela yang menggambarkan kondisi perusahaan secara menyeluruh kepada pihak manajemen.

Keberadaan dewan komisaris dan komite audit juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela, apabila perusahaan menganggap fungsi dari pengungkapan sukarela telah digantikan oleh mekanisme internal kontrol yang baik, sehingga perusahaan memandang tidak perlu untuk melakukan pengungkapan sukarela (Collier, 1993). Sementara itu Arshad et al. (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *independent non-executive director* dengan pengungkapan sukarela karena *independent non-executive director* lebih berfokus kepada pengungkapan wajib dan lebih memperhatikan sistem akuntansi pada perusahaan.

Chau & Gray (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa komisaris independen dalam perusahaan kepemilikan keluarga secara efektif dapat melakukan pengawasan terhadap manajer, sehingga mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan sukarela yang lebih. Sedangkan Chau & Leung Allegrini & Greco (2011) mengatakan bahwa tingkat frekuensi rapat komite audit dapat menimbulkan tingginya pengungkapan sukarela perusahaan.

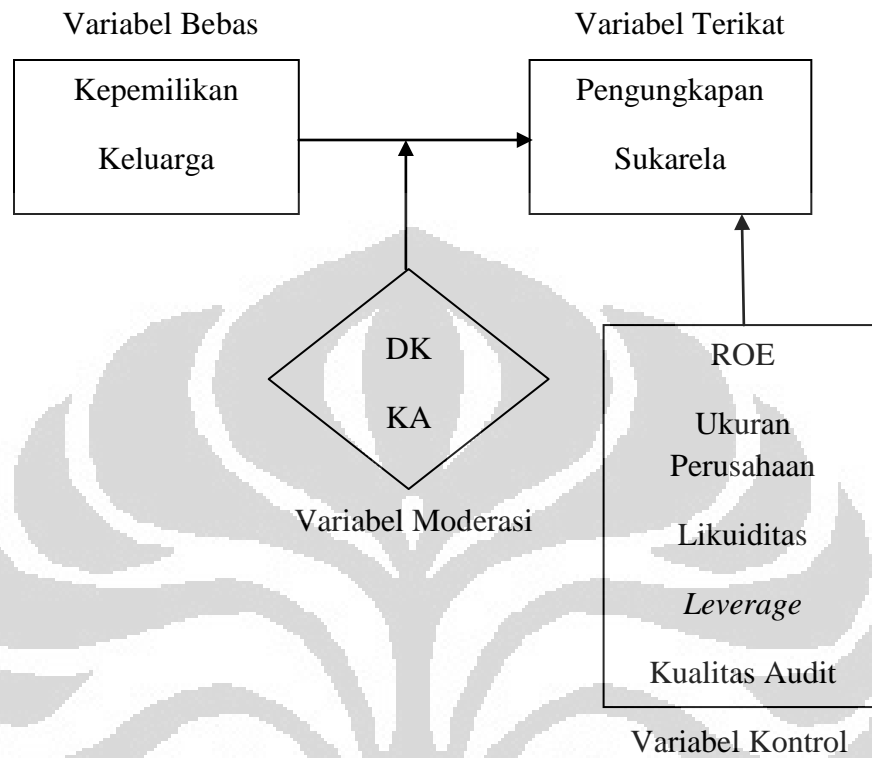
Dewan komisaris dan komite audit yang efektif akan memiliki pemahaman yang baik atas manfaat dari pengungkapan sukarela sehingga akan menuntut pengungkapan sukarela yang tinggi. Sebaliknya, jika dewan komisaris dan komite audit tidak efektif dan didominasi oleh pihak dalam, maka dorongan untuk melakukan pengawasan menjadi lemah, dan tuntutan atas pengungkapan sukarela akan rendah sehingga manajemen cenderung akan memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilan keuntungan pribadi. Berdasarkan teori serta penelitian sebelumnya, maka efektifitas dewan komisaris dan komite audit dapat mendorong tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan kepemilikan keluarga.

Hipotesis 2a: Efektifitas dewan komisaris berpengaruh positif dan dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela

Hipotesis 2b: Efektifitas komite audit berpengaruh positif dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pembuktian empiris atas pengaruh dari kepemilikan keluarga dalam perusahaan – perusahaan publik di Indonesia terhadap pengungkapan sukarela dengan pengaruh moderasi dari GCG dalam memperlemah hubungan negatif kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan sukarela. Proksi yang digunakan dalam GCG adalah efektifitas komite dewan komisaris dan komite audit. Sesuai dengan tujuan ini, maka kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara masing – masing variabel adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa *annual report* yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 – 2010. Data-data tersebut diperoleh dari pusat referensi pasar modal Bursa Efek Indonesia, website resmi BEI (www.idx.co.id), serta *website* perusahaan yang terkait, serta Indonesian *Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2011 yang berisi tentang ringkasan data perusahaan tahun 2008, 2009, 2010. Selain itu, dilakukan pula studi literatur–literatur dan penelitian sebelumnya yang dianggap berkaitan dengan mempelajari jurnal ataupun sumber informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung landasan–landasan ilmiah dalam melakukan analisis dalam penelitian.

1.2. Sampel Penelitian

Populasi data untuk penelitian ini merupakan seluruh perusahaan publik kategori manufaktur (Mengacu kepada daftar perusahaan manufaktur berdasarkan klasifikasi ICMD) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 – 2010. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria – kriteria tertentu atau pertimbangan peneliti. Hal yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah ketersediaan data berupa: Persentase kepemilikan perusahaan, laporan tahunan perusahaan secara keseluruhan, dan ringkasan informasi keuangan penting perusahaan.

Tabel 3.1
Ringkasan Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan <i>Sample</i>	2009	2010
Jumlah perusahaan manufaktur	146	146
Laporan Tahunan yang tidak ada	(11)	(13)
Laporan Tahunan yang tidak lengkap	(6)	(5)
Perusahaan Dengan Nilai Ekuitas Negatif	(12)	(8)
Jumlah Sample Perusahaan yang Terpakai	117	120
Total <i>sample</i>	237	

3.3 Model Penelitian

Model 1:

$$VD = \beta_0 + \beta_1 \text{FamOwn}_{it} + \beta_2 \text{ROE}_{it} + \beta_3 \text{SIZE}_{it} + \beta_4 \text{LIQ}_{it} + \beta_5 \text{LEV}_{it} + \beta_6 \text{BIG4}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model ini digunakan untuk menguji

Hipotesis 1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela

Model 2:

$$VD = \beta_0 + \beta_1 \text{FamOwn}_{it} + \beta_2 \text{DK}_{it} + \beta_3 \text{FamOwn} * \text{DK}_{it} + \beta_4 \text{KA}_{it} + \beta_5 \text{FamOwn} * \text{KA}_{it} + \beta_6 \text{ROE}_{it} + \beta_7 \text{SIZE}_{it} + \beta_8 \text{LIQ}_{it} + \beta_9 \text{LEV}_{it} + \beta_{10} \text{BIG4}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model ini digunakan untuk menguji

Hipotesis 2a :Efektifitas dewan komisaris memperlemah pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Hipotesis 2a :Efektifitas komite audit memperlemah pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Dimana:

VD : Indeks pengungkapan sukarela perusahaan i pada tahun fiskal t.

FamOwn_{it} : Persentase kepemilikan keluarga pada perusahaan i pada tahun fiskal t.

DK_{it} : Skor efektifitas dewan komisaris perusahaan i pada tahun fiskal t.

- KA_{it} : Skor efektifitas komite audit perusahaan i pada tahun fiskal t.
- ROE_{it} : *Return on Equity* perusahaan i pada tahun fiskal t.
- SIZE_{it} : Ukuran perusahaan i pada tahun fiskal t; log natural dari *total asset*.
- LIQ_{it} : *Liquidity* perusahaan i pada tahun fiskal t; *current asset* dibagi *current liabilities*.
- LEV_{it} : *Leverage* perusahaan i pada tahun fiskal t; total kewajiban dibagi *total asset*.
- BIG4_{it} : *Dummy* kualitas audit perusahaan i pada tahun fiskal t; 1 jika diaudit oleh KAP *Big 4*, 0 lainnya.
- ε_{it} : Koefisien eror (kekeliruan pengukuran dan faktor lain).

Tabel 3.2
Variabel Penelitian dan Ekspetasi Tanda Koefisien

Model 1		Model 2	
Variabel	Prediksi Tanda	Variabel	Prediksi Tanda
Variabel Dependen		Variabel Dependen	
VolDisc		VolDisc	
Variabel Independen		Variabel Independen	
FamOwn	-	FamOwn	-
ROE	+	DK	+
SIZE	+	KA	+
LIQ	-	FamOwn*DK	+
LEV	+	FamOwn*KA	+
BIG4	+	ROE	+
		SIZE	+
		LIQ	-
		LEV	+
		BIG4	+

3.4 Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan setiap tahunnya yang diukur dengan indeks pengungkapan sukarela yang mengacu pada item pengungkapan Adhariani (2006), dan disesuaikan

dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/2006. Terdapat penghapusan terhadap beberapa item pada kategori *background information*, *industry trend discussion*, *management discussion and analysis*, *social reporting*, *capital market data*, dan *description of corporate governance*, karena menurut peraturan yang berlaku saat ini, *item-item* tersebut pada saat ini sudah termasuk pengungkapan wajib. Setelah melakukan penyesuaian *item* skoring terhadap peraturan yang berlaku saat ini, terdapat total 46 *item* pengungkapan sukarela seperti yang telah dirangkum pada lampiran 9.

Indeks pengungkapan sukarela menggunakan indeks pengungkapan tanpa pembobotan, yaitu pemberian skor 1 pada setiap *item* pengungkapan apabila melakukan pengungkapan informasi dalam instrumen dan diberi skor 0 apabila tidak mengungkapkan. Perhitungan indeks pengungkapan sukarela tanpa pembobotan dilakukan karena laporan tahunan disampaikan untuk kepentingan seluruh *stakeholders*, sehingga suatu jenis informasi tidak dapat dianggap lebih penting daripada yang lain, karena setiap informasi dipandang penting tergantung dari sudut pandang pengguna laporan tahunan perusahaan. Semakin banyak elemen yang diungkapkan maka semakin besar pula indeks ungkapan sukarela perusahaan tersebut. Penelitian menggunakan indes pengungkapan tanpa pembobotan antara lain pernah dilakukan oleh Cooke (1989), Suripto (1999), Fitriany (2001), Adhariani (2006). Penggunaan indeks pengungkapan Adhariani (2006) dilakukan karena *item-item* pengungkapan sudah pernah digunakan sebelumnya di Indonesia, sehingga *item-item* yang ada dipandang relevan dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Indeks pengungkapan merupakan perbandingan antara skor total pengungkapan yang dicapai oleh suatu perusahaan dengan skor pengungkapan maksimum yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan. Skor pengungkapan maksimum mencerminkan seluruh *item* pengungkapan yang diharapkan diungkap oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Skor total pengungkapan untuk suatu perusahaan merupakan penjumlahan seluruh *item* yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut, dan kemudian dikuantifikasi. *Item* indeks pengungkapan sukarela terdiri dari beberapa faktor yang mencakup *background information*, *financial overview*, *key*

non-financial statistics, projected information, management discussion and analysis, research and development activities, employee information, social reporting and value added information.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini merupakan besarnya persentase kepemilikan keluarga yang terdapat di perusahaan-perusahaan yang ada pada sampel penelitian yang mengacu pada penelitian (Chau & Gray, 2010). Menurut Arifin (2003) definisi keluarga adalah keseluruhan individu dan perusahaan (kecuali perusahaan publik, negara, dan institusi keuangan) yang kepemilikannya tercatat dalam kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang tidak terdaftar biasanya dimiliki secara tertutup atau terbatas sehingga sering dianggap sebagai salah satu bentuk pengendalian oleh keluarga (Faccio dan Lang, 2002 dalam Maury, 2006).

Sedangkan batas 5% digunakan sebagai *cut-off* pencantuman nama pemegang saham dalam laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Industri Manufaktur yang dikeluarkan BAPEPAM melalui surat edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002.

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi dapat memberikan efek memperkuat maupun memperlemah hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas peran Dewan Komisaris (DK) dan Komite Audit (KA) perusahaan sebagai efek dari penerapan *Good Corporate Governance*.

Pemakaian variabel moderasi dalam penelitian ini mengacu pada metode pengukuran skor efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam penelitian Hermawan (2009). Pengukuran skor dilakukan dengan menggunakan daftar *item* pertanyaan sebagai acuan dalam memberikan penilaian atas efektifitas dewan komisaris dan komite audit. Penilaian dilakukan dengan kriteria yang telah ditetapkan

dengan menggunakan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan tata kelola perusahaan. Daftar pertanyaan mengacu pada daftar pertanyaan yang dikembangkan oleh Hermawan (2009) dari literatur-literatur tata kelola perusahaan dan kuesioner yang dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*. Penetapan skor dan metode konversi keefektifan dewan komisaris dan komite audit pada penelitian ini mengacu kepada Hermawan (2009). Untuk setiap pertanyaan, penilaian akan terdiri dari 3 kemungkinan jawaban, yaitu *Good*, *Fair*, dan *Poor*. Jawaban *Good* diberi nilai 3, *Fair* diberi nilai 2, dan *Poor* diberi nilai 1.

Total pertanyaan untuk pengukuran skor dewan komisaris adalah 17 pertanyaan seperti yang tertera pada lampiran 10, sehingga skor efektifitas dewan komisaris maksimal yang dapat diperoleh tiap perusahaan adalah 51. Sedangkan total pertanyaan untuk penilaian komite audit adalah 11 pertanyaan, seperti yang tertera pada lampiran 11, Sehingga skor efektifitas komite audit maksimal yang dapat diperoleh tiap perusahaan adalah 33.

Efektifitas peran pengawasan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai penelitian Hermawan (2009) yang mencakup *board independence*, *board activities*, *board size*, *board expertise and competence*. Sedangkan untuk efektifitas pengawasan komite audit dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencakup *audit committee activities*, *audit committee size*, *audit committee expertise and competence*.

Setelah diperoleh skor untuk setiap pertanyaan, maka variabel DK dan KA masing-masing akan dikenakan *treatment* berupa *centering* skor untuk menghindari adanya gejala multikolinearitas, yang kemudian diinteraksikan dengan variabel FamOwn. Dengan adanya efektifitas dewan komisaris dan komite audit, diharapkan hasil dari interaksi variabel tersebut dapat mengurangi pengaruh negatif dari hubungan antara persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Koefisien interaksi antar variabel tersebut diperkirakan bernilai positif dalam pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan sukarela, atau bernilai negatif namun dengan nilai koefisien yang lebih rendah.

3.4.4 Variabel Kontrol

Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ROE, ukuran perusahaan, *liquidity*, *leverage*, *big four*.

1. *Profitability*

Variabel ini diukur dengan rasio *Return on Equity* yaitu *net profit* dibagi dengan *total equity* untuk menilai performa perusahaan. Shingvi & desai (1971) memaparkan bahwa perusahaan dengan performa yang baik cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela lebih luas.

2. Ukuran Perusahaan

Variabel ini diukur berdasarkan nilai dari logaritma natural dari total asset. Cooke et al (1989) menjelaskan bahwa pada umumnya perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

3. *Liquidity*

Variabel ini diukur dengan rasio lancar yaitu asset lancar dibagi dengan hutang lancar. Wallace et al (1994) menyatakan bahwa ukuran kinerja perusahaan dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas. Perusahaan dengan rasio likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja perusahaan dibandingkan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi.

4. *Leverage*

Variabel ini diukur dengan rasio total *liability* dibagi *total asset*. Ang (1997) memaparkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* semakin tinggi, maka semakin tinggi pengungkapan sukarela yang perlu diungkapkan untuk memenuhi kebutuhan kreditur akan informasi.

5. Kualitas Audit

Variabel ini diukur dengan variabel *dummy* dengan cara pemberian nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *big four*, dan pemberian nilai 0 jika sebaliknya.. Chen (2005) menjelaskan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* cenderung melakukan pengungkapan sukarela yang tinggi.

3.5 Pengujian Asumsi Klasik

Penggunaan model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria *BLUE (Best Liniear Unbiased Estimator)*. Untuk menggambarkan data valid dan *reliable* untuk digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengukur pemenuhan kriteria BLUE pada model regresi berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji pemenuhan persyaratan distribusi normal dari data dan residual dalam model regresi (Gujarati, 2009). Suatu data dapat dikatakan normal apabila data tersebut telah memenuhi persyaratan distribusi normal. Proses uji normalitas harus memperhatikan penyebaran data pada normal *P-Plot of Regression Standardized Residual* dari variabel independen, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Nachrowi dan Usman, 2006).

Jika data yang akan diregresikan dalam model sedikit atau kecil, misalnya kurang dari 100 obsevasi, maka uji asumsi normalitas akan menjadi asumsi penting. Namun, jika jumlah data banyak atau besar maka error term diasumsikan sudah terdistribusi secara normal dan data dapat diasumsikan valid, sehingga uji asumsi normalitas tidak terlalu krusial jika jumlah data banyak atau besar (Gujarati, 2009).

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena jika korelasi tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas bernilai nol. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel

independent terhadap variabel dependen. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Secara umum multikolinieritas tidak dianggap sebagai masalah besar jika VIF mendekati angka 1 dan lebih kecil dari angka 10 (Ghozali, 2006). Semakin tinggi nilai *VIF*, maka semakin tinggi pula kolinearitas antar variabel independen (Gujarati, 2005).

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika besar varians tetap maka persamaan regresi disebut homoskedastisitas, dan jika terjadi perbedaan varians maka persamaan regresi tersebut dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas pada model regresi yaitu dengan menggunakan uji *White Heteroskedasticity*, lalu melihat nilai probabilitas dari *Prob. Chi-Square*. Bila nilai probabilitas di atas 0,05, maka variabel dalam model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas (Winarno, 2009).

3.6 Pengujian Statistik

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan pergerakan variabel dependen dalam persamaan/model yang akan diteliti. Bila *Adjusted R²* = 0, artinya variasi dari variabel dependen tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel independennya. Sementara bila *Adjusted R²* = 1, artinya variasi dari variabel dependennya dapat dijelaskan 100% oleh variabel independennya.

Adjusted R² berguna untuk mengukur kedekatan antara nilai prediksi dan nilai sesungguhnya dari variabel terikat. Semakin besar *Adjusted R²*, maka semakin besar (kuat) pula hubungan antara variabel dependen dengan satu atau banyak variabel independen (Nachrowi & Usman, 2006).

3.6.2 Uji Signifikansi F

Uji F statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan atau tidak. Suatu model dianggap signifikan jika nilai probabilitas F (F-stat) $< \alpha$, pada tingkat keyakinan 99%, 95% maupun 90% (Nachrowi & Usman, 2006).

3.6.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t statistik ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Koefisien variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya jika probabilitas t statistiknya $< \alpha$, pada tingkat keyakinan 99%, 95% maupun 90% (Nachrowi & Usman, 2006).

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Tingkat Pengungkapan Sukarela

Dari hasil statistik deskriptif perhitungan index pengungkapan sukarela, item pengukuran indeks pengungkapan sukarela dapat dikategorikan menjadi delapan kategori pengungkapan.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif per Kategori Pengungkapan

Kategori Pengungkapan	Jumlah perusahaan yang mengungkapkan	Tingkat Pengungkapan Sukarela			
		Mean	Max	Min	Skala
<i>Background information</i>	236	2,77	4	0	5
<i>Financial overview</i>	10	0,04	1	0	2
<i>Key non-financial statistics</i>	227	1,90	5	0	10
<i>Projected information</i>	198	1,66	6	0	10
<i>Management discussion and analysis</i>	179	1,40	4	0	4
<i>R&D Activities</i>	3	0,01	1	0	4
<i>Employee information</i>	154	1,14	8	0	9
<i>Value added Information</i>	0	0,00	0	0	2

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan tertinggi terdapat pada kategori *background information*, yaitu sebesar 2,77 yang juga merupakan kategori dimana hampir seluruh perusahaan melakukan pengungkapan kategori tersebut. Pada kategori ini, perusahaan banyak melakukan pengungkapan terhadap item *the effect of corporate strategy on current and future results are discussed*, dengan tujuan untuk menunjukkan kesanggupan manajemen menjalankan

strategi dalam mengelola perusahaan. Sedangkan rata-rata pengungkapan terendah terdapat pada *kategori value added information*, dimana tidak ada perusahaan yang melakukan pengungkapan, dikarenakan penyusunan *value added information* belum memiliki aturan yang jelas dan kurang populer di Indonesia.

Terdapat 10 perusahaan yang melakukan pengungkapan pada kategori *financial overview* dengan rata-rata pengungkapan 0,04. Rendahnya pengungkapan disebabkan karena item pengungkapan pada kategori ini merupakan informasi yang biasanya ditujukan untuk kepentingan *internal perusahaan*, seperti *item information of expenses, classified as fixed and variable costs, dan item information of expected return on a project to be done*.

Pada kategori *key non-financial statistics* terdapat 227 perusahaan yang melakukan pengungkapan dengan rata-rata 1,9. Item-item pada kategori ini merupakan penjelasan dari proses produksi perusahaan. Item-item pengungkapan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan pada kategori ini adalah *item percentage of sales in products designed in the last five years* dan *item prices of material consumed*, dikarenakan *item* tersebut merupakan pengembangan dari pengungkapan wajib yang telah di atur dalam keputusan ketua Bapepam-LK no:KEP-134/BL/2006 mengenai ikhtisar data keuangan penting, dan pada tahun 2009-2010 harga bahan baku mengalami perubahan yang disebabkan oleh ketidak stabilan harga minyak dunia serta dampak dari krisis global.

Kategori *projected information* menjelaskan mengenai proyeksi performa perusahaan di masa mendatang. Terdapat 198 perusahaan yang melakukan pengungkapan item tersebut dengan rata-rata pengungkapan 1,66. Namun mayoritas perusahaan hanya melakukan proyeksi terhadap performa perusahaan secara umum untuk menghindari pemberian informasi yang menyesatkan oleh pihak manajemen kepada *stakeholders*.

Pada kategori *management discussion and analysis* terdapat 179 perusahaan yang melakukan pengungkapan dengan rata-rata 1,4. Item-item dalam pengungkapan tersebut erat kaitannya dengan pengungkapan wajib pada laporan tahunan, yaitu seputar beban dan persediaan yang mengalami perubahan setiap periodenya.

Dalam kategori pengungkapan *research and development activities*, hanya terdapat 3 perusahaan yang melakukan pengungkapan sesuai item yang ditentukan. Perusahaan tidak melakukan pengungkapan mengenai aktivitas riset dan pengembangan secara luas karena aktivitas tersebut merupakan hal yang berkaitan erat dengan strategi khusus perusahaan dalam menghasilkan dan mengembangkan suatu produk, sehingga perusahaan merasa tidak perlu untuk melakukan pengungkapan kepada para pengguna laporan tahunan.

Pada pengungkapan kategori *employee information* terdapat 154 perusahaan dengan rata-rata pengungkapan 1,14. Item *breakdown of employees by line of business* merupakan item terbanyak yang diungkapkan dalam kategori pengungkapan ini dengan mengungkapkan mengenai penggolongan karyawan berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikannya.

4.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4.1 memaparkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari keseluruhan variabel yang digunakan dalam 237 sampel penelitian. Dari hasil statistika deskriptif, variabel indeks pengungkapan sukarela memiliki nilai rata-rata 0,197, nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai tengah 0,174. Dengan lebih tingginya nilai rata-rata bila dibandingkan dengan nilai tengah, menjelaskan bahwa lebih dari 50% sampel penelitian memiliki nilai indeks pengungkapan sukarela di bawah rata-rata. Nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai rata-rata dan nilai tengah pada penelitian Adhariani (2006) yang masing-masing bernilai 0,156 dan 1,59. Nilai rata-rata indeks pengungkapan sukarela pada penelitian ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai rata-rata indeks pengungkapan sukarela penelitian Chau & Gray (2010) senilai 0,19, namun lebih rendah bila dibandingkan dengan penelitian Ho & Wong (2001) yaitu senilai 0,29.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Min	Med	Max	Std. Dev.
VD	237	0,197	0,087	0,174	0,413	0,078
FamOwn	237	0,286	0,000	0,180	0,982	0,298
ROE	237	0,097	-2,063	0,120	3,236	0,365
SIZE	237	4,440 T	6,931 M	993,465 M	112,857 T	11,947 T
LIQ	237	3,260	0,150	1,560	113,720	9,931
LEV	237	0,490	0,040	0,500	0,970	0,211
BIG4	237	0,447	0,000	0,000	1,000	0,498
DK	237	0,747	0,451	0,745	0,922	0,083
KA	237	0,734	0,333	0,758	0,970	0,130

Keterangan: **VD** = *Voluntary Disclosure*; skor index pengungkapan sukarela. **FamOwn** = *Family Ownership*; persentase kepemilikan keluarga. **ROE** = *Return on Equity*; proporsi laba/rugi bersih dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. **SIZE** = *Size*; ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan logaritma natural dari total aset perusahaan. **LIQ** = *Liquidity*; proporsi aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar perusahaan. **LEV** = *Leverage*; proporsi total kewajiban dibandingkan dengan total aset perusahaan. **BIG4** = *Dummy* untuk Penggolongan kualitas auditor; 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *big four*, dan 0 jika lainnya. **DK** = Skor efektifitas dewan komisaris; **KA** = Skor efektifitas komite audit.

Dari hasil statistik deskriptif tabel 4.1 variabel persentase FamOwn memiliki nilai rata-rata 28,6 % dengan rentang yang luas antara 0% sampai dengan 98,2%. Jauhnya rentang nilai persentase kepemilikan keluarga pada penelitian ini tidak berbeda jauh dengan penelitian Chau & Gray (2010) yang mencatatkan rentang nilai pada penelitiannya antara 0,01% sampai dengan 0,81%, dengan rata-rata nilai persentase kepemilikan keluarga sebesar 37%.

Berdasarkan statistik deskriptif tabel 4.1 dijelaskan bahwa variabel kontrol ROE dan *leverage* memiliki nilai rata-rata lebih rendah daripada nilai tengah yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50% sampel penelitian memiliki nilai ROE di atas rata-rata. Untuk variabel kontrol ukuran perusahaan, dan likuiditas memiliki nilai rata-rata di atas nilai tengah yang mengindikasikan bahwa lebih dari 50% sampel penelitian memiliki ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas, di bawah rata-rata.

Sedangkan untuk variabel kontrol kualitas audit, terdapat 44,7% sampel perusahaan yang kualitas auditnya dapat dianggap baik.

Dari hasil statistik deskriptif tabel 4.1 variabel DK memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada nilai tengahnya, yang menerangkan bahwa lebih dari 50% sampel penelitian memiliki nilai DK di bawah nilai rata-rata. Sedangkan variabel KA memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tengahnya, yang menerangkan bahwa lebih dari 50% sampel penelitian memiliki nilai DK di atas nilai rata-rata.

Tabel 4.2 menjelaskan mengenai matriks korelasi antara variabel indeks pengungkapan sukarela, variabel persentase kepemilikan keluarga, variabel skor efektifitas dewan komisaris, variabel skor efektifitas komite audit, dan variabel kontrol. Nilai-nilai yang tercantum di bawah diagonal menampilkan nilai *Pearson Correlation* antar variabel. Variabel indeks pengungkapan sukarela (VD) berkorelasi negatif signifikan terhadap variabel persentase kepemilikan keluarga (FamOwn) sebesar -0,281. Terhadap variabel kontrol, variabel VD berkorelasi positif signifikan terhadap variabel ukuran perusahaan (SIZE) dan variabel kualitas audit (BIG4) masing-masing sebesar sebesar 0,324 dan 0,39. Variabel VD juga berkorelasi negatif signifikan terhadap variabel *liquidity* (LIQ) sebesar 0,115. Sedangkan Variabel VD berkorelasi negatif tidak signifikan terhadap variabel leverage (LEV) sebesar 0,024, dan berkorelasi positif tidak signifikan terhadap variabel ROE sebesar 0,071. Terhadap variabel pemoderasi, variabel VD memiliki korelasi positif signifikan terhadap variabel skor efektifitas dewan komisaris (DK) dan variabel skor efektifitas komite audit (KA) masing-masing sebesar 0,445 dan 0,420.

Tabel 4.3
Pearson Correlation Antar Variabel Penelitian

Variable		VD	FamOwn	ROE	SIZE	LIQ	LEV	BIG4	DK	KA
VD	Corr.	1								
FamOwn	Corr.	-0,281**	1							
ROE	Corr.	0,071	-0,035	1						
SIZE	Corr.	0,324**	-0,064	0,178**	1					
LIQ	Corr.	-0,115*	-0,147*	0,037	-0,077	1				
LEV	Corr.	-0,024	0,103	-0,349**	0,058	-0,571**	1			
BIG4	Corr.	0,390**	-0,217**	0,211**	0,404**	-0,009	-0,116*	1		
DK	Corr.	0,445**	-0,316**	0,122*	0,267**	0,019	-0,109*	0,328**	1	
KA	Corr.	0,420**	-0,094	0,183**	0,296**	0,035	-0,144*	0,337**	0,498**	1

Keterangan: **VD** = *Voluntary Disclosure*; skor index pengungkapan sukarela. **FamOwn** = *Family Ownership*; persentase kepemilikan keluarga. **ROE** = *Return on Equity*; proporsi laba/rugi bersih dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. **SIZE** = *Size*; ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan logaritma natural dari total aset perusahaan. **LIQ** = *Liquidity*; proporsi asset lancar dibandingkan dengan hutang lancar perusahaan. **LEV** = *Leverage*; proporsi total kewajiban dibandingkan dengan total aset perusahaan. **BIG4** = *Dummy* untuk penggolongan kualitas auditor; 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *big four*, dan 0 jika lainnya. **DK** = Skor efektifitas dewan komisaris. **KA** = Skor efektifitas komite audit.
 **. *Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).*
 *. *Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*

Tabel 4.4
Hasil Regresi Berganda Atas Model 1 dan 2

Variabel	Prediksi Tanda	Model 1			Model 2		
		β	Sig.	VIF	β	Sig.	VIF
(Constant)		0,054	0,169		0,136***	0,002	
FamOwn	-	-0,061***	0,000	1,075	-0,052***	0,001	1,234
DK	+				0,248***	0,000	2,544
KA	+				0,193***	0,000	2,523
FamOwn*DK	+				-0,251	0,149	2,501
FamOwn*KA	+				-0,221**	0,034	2,267
ROE	+	0,000	0,338	1,256	0,000	0,152	1,262
SIZE	+	0,010***	0,001	1,241	0,005*	0,071	1,322
LIQ	-	-0,009***	0,007	1,583	-0,007**	0,014	1,607
LEV	+	-0,043	0,133	1,809	-0,003	0,874	1,975
BIG4	+	0,042***	0,000	1,298	0,027**	0,016	1,383
Dependend Var	VD	VD					
N	237	237					
R ²	0,253	0,378					
Adj. R ²	0,233	0,351					
F	12,962	13,747					
Sig.	0,000	0,000					

Keterangan: **VD** = *Voluntary Disclosure*; skor index pengungkapan sukarela. **FamOwn** = *Family Ownership*; persentase kepemilikan keluarga. **ROE** = *Return on Equity*; proporsi laba/rugi bersih dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. **SIZE** = *Size*; ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan logaritma natural dari total aset perusahaan. **LIQ** = *Liquidity*; proporsi asset lancar dibandingkan dengan hutang lancar perusahaan. **LEV** = *Leverage*; proporsi total kewajiban dibandingkan dengan total aset perusahaan. **BIG4** = *Dummy* untuk penggolongan kualitas auditor; 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *big four*, dan 0 jika lainnya. **DK** = Skor efektifitas dewan komisaris. **KA** = Skor efektifitas komite audit.

*** Signifikan (*1-tailed*) pada $\alpha = 1\%$.

** Signifikan (*1-tailed*) pada $\alpha = 5\%$.

* Signifikan (*1-tailed*) pada $\alpha = 10\%$.

4.3. Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian regresi berganda atas model 1 pada tabel 4.4 digunakan untuk menguji hipotesis 1 beserta beberapa pengujian asumsi klasik karena pengujian dengan regresi berganda mewajibkan semua data variabel telah memenuhi kriteria asumsi klasik. Pengujian normalitas data pada model 1 ditunjukkan oleh plot uji normalitas pada lampiran 2, dimana hasil persebaran data telah tersebar dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu nilai residual dianggap telah mengikuti distribusi normal. Dari lampiran 1 dapat dilihat bahwa variabel *liquidity* memiliki nilai *skewness* 8,963, nilai tersebut di luar antara nilai -2 dan 2. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat data *outlier* pada variabel *liquidity*. Oleh karena itu akan dilakukan *treatment* menggunakan tehnik *winsorization* pada variabel *liquidity* (lihat lampiran 1). Data yang telah di-*treatment* nantinya akan dipakai dalam pengujian selanjutnya.

Untuk pengujian atas multikolienaritas, pengujian dilakukan dengan melihat nilai VIF tiap variabel model 1 pada tabel 4.4 yang kurang dari 10, membuktikan bahwa semua data sudah terbebas dari masalah multikolinearitas (lihat lampiran 3). Pengujian atas asumsi heteroskedastisitas dilakukan dengan uji White atas variabel-variabel pada model 1, dan tidak ditemukan adanya gejala heterokedastisitas, sehingga data telah memenuhi asumsi homokedastisitas (lihat lampiran 4).

Pengujian reabilitas terhadap *item* skoring yang digunakan untuk mendapatkan indeks pengungkapan sukarela menggunakan pengukuran skala *Cronbach's Alpha* pada lampiran 8. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk skoring pengungkapan sukarela adalah 0,668. Nilai tersebut telah melewati batas 0,6 yang membuktikan bahwa skoring indeks pengungkapan sukarela dapat diterima.

Nilai Anova (Sig.) atau nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,000, dimana nilai probabilitas F-statistik lebih kecil daripada 0,01. Hal ini menjelaskan bahwa model persamaan yang digunakan pada penelitian ini sudah tepat dalam menjelaskan hubungan antara persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Nilai Adj. R^2 sebesar 0,233 menjelaskan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat pada model 1 adalah sebesar 23,3% dengan tingkat keyakinan 99%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,7% dijelaskan oleh variabel lain yang belum termasuk dalam model penelitian ini

4.3.1. Kepemilikan Keluarga dan Pengungkapan Sukarela

Variabel FamOwn memiliki koefisien negatif sebesar -0,061 dengan signifikansi 0,000 (lebih rendah dari $\alpha = 1\%$). Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dari variabel FamOwn terhadap variabel VD dengan tingkat keyakinan 99%. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan keluarga, maka semakin rendah tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini menegaskan bahwa setiap ada kenaikan persentase kepemilikan sebesar 1% maka akan menyebabkan pengungkapan sukarela berkurang sebesar 0,061%. Hal ini konsisten dengan penelitian Chau & Gray (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan sebesar -3,831 pada variabel FamOwn terhadap variabel VD. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima, kepemilikan keluarga terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sukarela

4.3.2. ROE, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Kualitas Audit, dan Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan model 1 pada tabel 4.4 koefisien variabel ROE mempunyai nilai sebesar 0,000 dengan signifikansi 0,338. Hal ini menunjukkan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil ini tidak dapat membuktikan penelitian Shingvi & Desai (1971) yang mengatakan bahwa *profit margin* yang tinggi akan menyebabkan tingginya tingkat pengungkapan sukarela.

Koefisien dari variabel SIZE senilai 0,01 dengan signifikansi 0,001. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan atas ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada tingkat keyakinan 99%. Hasil ini membuktikan penelitian Cooke et al (1989) yang mengatakan bahwa semakin tinggi ukuran

perusahaan, maka akan semakin tinggi pula *public demand* akan informasi yang lebih tinggi.

Koefisien variabel LIQ mempunyai nilai sebesar -0,009 dengan signifikansi 0,007. Hal ini menunjukkan bahwa LIQ memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil ini membuktikan penelitian Wallace et al (1994) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas rendah perlu memberikan informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja perusahaan dibandingkan perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi.

Koefisien variabel LEV mempunyai nilai sebesar -0,043 dengan signifikansi sebesar 0,133. Hal ini menunjukkan bahwa LEV memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil ini tidak dapat membuktikan penelitian Ang (1997) yang mengatakan bahwa pada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi.

Koefisien dari variabel BIG4 senilai 0,042 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan atas kualitas audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada tingkat keyakinan 99%. Hasil ini membuktikan penelitian Chen (2005) yang mengatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh *big four* cenderung melakukan pengungkapan sukarela yang tinggi.

4.4 Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian regresi berganda atas model 2 pada tabel 4.4 digunakan untuk menguji hipotesis 2 beserta beberapa pengujian asumsi klasik karena pengujian dengan regresi berganda mewajibkan semua data variabel telah memenuhi kriteria asumsi klasik.

Pengujian normalitas data pada model 2 ditunjukkan oleh plot uji normalitas, dimana hasil persebaran data telah tersebar dan mengikuti arah garis diagonal (lihat lampiran 5). Oleh karena itu nilai residual dianggap telah mengikuti distribusi normal. Dari lampiran 1 dapat dilihat bahwa nilai *skewness* variabel pemoderasi telah berada antara nilai -2 dan 2. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat data

outlier pada variabel tersebut. Untuk pengujian atas multikolienaritas, pengujian dilakukan dengan melihat nilai VIF tiap variabel model 2 pada tabel 4.4 yang kurang dari 10, membuktikan bahwa semua data sudah terbebas dari masalah multikolinearitas (lihat lampiran 6). Pengujian atas asumsi heteroskedastisitas dilakukan dengan uji White atas variabel-variabel pada model 2, ditemukan adanya gejala heterokedastisitas yang kemudian dilakukan *treatment* sehingga data telah memenuhi asumsi homokedastisitas (lihat lampiran 7).

Pengujian reabilitas terhadap *item* skoring yang digunakan untuk mendapatkan skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit menggunakan pengukuran skala *Cronbach's Alpha* pada lampiran 8. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk skoring efektifitas dewan komisaris dan komite audit adalah 0,687 dan 0,753. Nilai tersebut telah melewati batas 0,6 yang membuktikan bahwa skoring indeks pengungkapan sukarela dapat diterima.

Nilai Anova (Sig.) atau nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,000, dimana nilai probabilitas F-statistik lebih kecil daripada 0,01. Hal ini menjelaskan bahwa model persamaan yang digunakan pada penelitian ini sudah tepat dalam menjelaskan hubungan antara persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela

Nilai Adj. R² sebesar 0,378 menjelaskan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat pada model 2 adalah sebesar 37,8% dengan tingkat keyakinan 99%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 62,2% dijelaskan oleh variabel lain yang belum termasuk dalam model penelitian ini. Bila dibandingkan dengan Adj. R² pada model 1 yang sebesar 0,233, maka terdapat kenaikan Adj. R² yang disebabkan oleh penambahan variabel yaitu efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, interaksi kepemilikan keluarga dengan efektifitas dewan komisaris, dan interaksi kepemilikan keluarga dengan efektifitas komite audit. Hal ini menjelaskan bahwa dengan penambahan 4 variabel tersebut ke dalam model penelitian, maka dapat meningkatkan kemampuan penjelasan oleh model penelitian.

4.4.1. Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Pengungkapan Sukarela

Model 2 menguji dampak persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela yang dimoderasi oleh efektifitas dewan komisaris dan komite audit. Variabel DK memiliki koefisien positif 0,248 dengan signifikansi 0,000. Variabel KA memiliki koefisien positif 0,193 dengan signifikansi 0,000. Kedua nilai signifikansi variabel dibawah 0,01 ($\alpha = 1\%$) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari variabel DK dan KA terhadap tingkat keluasan pengungkapan sukarela. Hasil ini mendukung penelitian Chau & Gray (2010) yang mengatakan bahwa komisaris independen (yang merupakan salah satu *item* pengukuran dari efektifitas dewan komisaris) dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen sehingga memaksa manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela yang lebih tinggi. Hasil ini juga mendukung penelitian O'Sullivan et al (2008) yang mengatakan bahwa frekuensi rapat komite audit (yang merupakan salah satu *item* pengukuran dari efektifitas komite audit) dapat mendorong tingginya tingkat pengungkapan sukarela.

Interaksi antar variabel FamOwn dan DK memiliki koefisien negatif senilai -0,251 dengan signifikansi 0,149 (lebih tinggi dari $\alpha = 10\%$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan atas efektifitas dewan komisaris untuk memperlemah pengaruh negatif persentase kepemilikan keluarga dengan tingkat pengungkapan sukarela. Hasil ini tidak membuktikan penelitian Chau & Gray (2010) yang menyatakan bahwa komisaris independen (yang merupakan salah satu *item* pengukuran dari efektifitas dewan komisaris) dapat memperlemah pengaruh negatif dari persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Dengan demikian tidak ada cukup bukti untuk menerima hipotesis 2a.

Interaksi antar variabel FamOwn dan KA memiliki koefisien negatif senilai -0,221 dengan signifikansi 0,034. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektifitas komite audit memperkuat pengaruh negatif antara persentase kepemilikan keluarga dengan tingkat pengungkapan sukarela secara signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Hasil ini tidak membuktikan penelitian Chau & Leung (2006); dan Chau & Gray (2010) yang menyatakan bahwa komisaris independen (yang merupakan salah satu

item pengukuran dari efektifitas dewan komisaris) menuntut manajemen akan keberadaan komite audit yang dapat memperlemah pengaruh negatif dari persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Dengan demikian tidak ada cukup bukti untuk menerima hipotesis 2b.

Hal ini membuktikan bahwa dewan komisaris pada perusahaan kepemilikan keluarga tidak berjalan efektif dalam menjalankan fungsinya untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan sukarela yang lebih. Kontrol kepemilikan keluarga yang dominan telah mengendalikan dewan komisaris dikarenakan dewan komisaris diangkat oleh pihak pemilik keluarga. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang tidak efektif dalam menjalankan fungsinya membantu dewan komisaris dalam mengurangi rendahnya pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan keluarga, dan komite audit hanya berfokus membantu komisaris dalam memastikan perusahaan telah memenuhi ketaatan peraturan yang berlaku.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pengungkapan sukarela merupakan kebijakan manajemen untuk melakukan informasi keuangan dan non-keuangan yang dianggap relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan tahunan (Darrough, 1993), sehingga pengungkapan sukarela menjadi sarana penting bagi *stakeholders* sebagai untuk pengambilan keputusan menggunakan informasi di luar laporan keuangan berupa manajemen resiko, kebijakan, maupun prospek perusahaan di masa yang akan datang, ditambah lagi dengan alasan bahwa ketiadaan informasi dianggap dekat dengan berita buruk (Cheng & Li, 2008). Namun, perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung melakukan pengungkapan sukarela yang rendah, karena tidak terdapat asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen sehingga tidak tercipta konflik keagenan (Chen, Engel, & Smith, 2004), namun konflik keagenan justru muncul antara pemilik saham pengendali dengan pemilik saham non-pengendali (Ali et al, 2007).

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pembuktian atas pengaruh dari persentase kepemilikan keluarga pada perusahaan publik di Indonesia terhadap tingkat keluasan pengungkapan sukarela. Dan juga untuk pembuktian atas pengaruh dari efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap hubungan antara persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat keluasan pengungkapan sukarela pada perusahaan publik di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Semakin tinggi persentase kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat pengungkapan sukarela yang diungkapkan kepada *stakeholders*.

Sedangkan untuk pengujian pengaruh *profitability*, ukuran perusahaan, *leverage*, *liquidity*, dan kualitas audit, hanya ukuran perusahaan dan kualitas audit yang berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Semakin

besar ukuran perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela yang diungkapkan kepada *stakeholders*. Semakin tinggi kualitas auditor independen yang dipilih untuk melakukan audit atas perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela yang diungkapkan kepada *stakeholders*. Sedangkan *liquidity* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan menyebabkan semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil dari pengujian atas pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap hubungan antara persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela, menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris tidak dapat memperlemah hubungan negatif antara kepemilikan keluarga dengan tingkat pengungkapan sukarela. Dewan komisaris tidak efektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada pihak manajemen dalam perusahaan kepemilikan keluarga, sehingga dewan komisaris tidak dapat mendorong perusahaan dengan kepemilikan keluarga untuk melakukan pengungkapan sukarela yang lebih. Kuatnya kontrol kepemilikan keluarga menyebabkan dewan komisaris gagal mendorong perusahaan dengan kepemilikan keluarga untuk melakukan pengungkapan sukarela yang lebih. Ditambah lagi oleh dewan komisaris yang diangkat oleh pemilik keluarga yang menyebabkan dewan komisaris sulit untuk bertindak secara independen, dan dewan komisaris dibantu oleh komite audit yang tidak efektif. Komite audit tidak menjalankan fungsinya secara efektif dalam membantu dewan komisaris untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan sukarela yang lebih. Komite audit tidak dapat mengurangi rendahnya pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan kepemilikan keluarga dikarenakan komite audit hanya berfokus membantu komisaris dalam memastikan perusahaan telah memenuhi ketaatan terhadap peraturan yang berlaku untuk melakukan pengungkapan wajib perusahaan, dan komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang tidak efektif. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit juga hanya bersifat sebagai pemenuhan atas peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk regulator, agar melakukan *review* kepatuhan emiten terhadap peraturan yang mengatur tentang kewajiban emiten dalam menyampaikan laporan tahunan, dan terhadap peraturan yang mengatur tentang tata kelola perusahaan di Indonesia. Karena masih terdapat penyimpangan terhadap pengungkapan laporan tahunan dan tata kelola perusahaan di Indonesia.
2. Untuk emiten, agar melakukan pembenahan di bidang tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan tanpa menciderai kepentingan *stakeholders*.
3. Untuk masyarakat, agar lebih memperhatikan laporan tahunan perusahaan, karena format laporan tahunan memudahkan *stakeholders* dari beragam latar belakang untuk mengetahui aktivitas dan kondisi perusahaan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

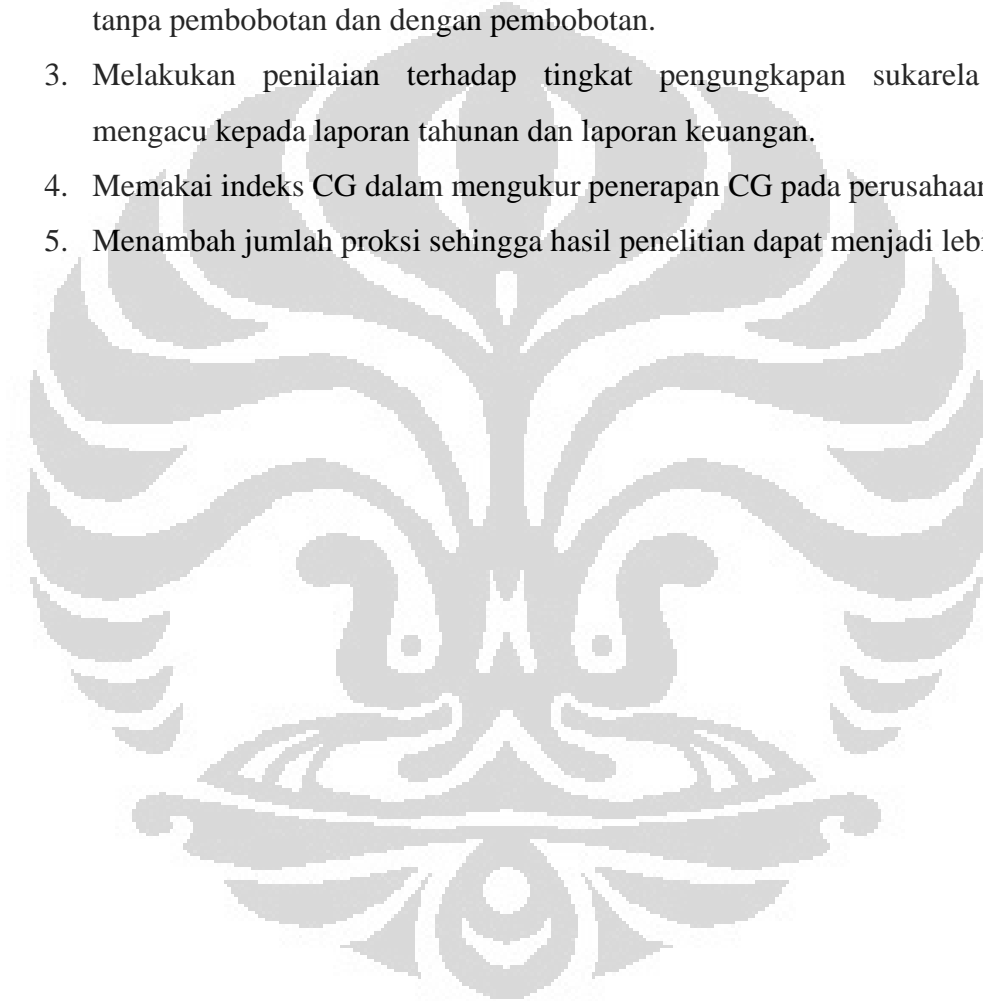
Beberapa keterbatasan yang harus dicermati dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada industri manufaktur, dan hanya dalam rentang waktu 2009 – 2010. Sehingga penelitian ini belum cukup untuk menggambarkan kondisi seluruh perusahaan publik di Indonesia.
2. Penelitian ini memakai pengukuran indeks pengungkapan sukarela tanpa pembobotan, sehingga tingkat pengungkapan sukarela perusahaan belum mencerminkan tingkat pengukuran pengungkapan sukarela yang akurat.
3. Penelitian ini hanya menggunakan laporan tahunan sebagai media dalam melakukan skoring indeks pengungkapan sukarela.

5.4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Memperluas sampel penelitian untuk seluruh industri perusahaan publik, serta menambah jumlah tahun penelitian.
2. Memakai dua pengukuran indeks pengungkapan sukarela yaitu pengukuran tanpa pembobotan dan dengan pembobotan.
3. Melakukan penilaian terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan mengacu kepada laporan tahunan dan laporan keuangan.
4. Memakai indeks CG dalam mengukur penerapan CG pada perusahaan.
5. Menambah jumlah proksi sehingga hasil penelitian dapat menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, Desi. (2006). Tingkat Keluasan Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan dan Hubungannya Dengan *Current Earnings Response Coefficient* (ERC). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2, 24-57.
- Ali, A., Chen, T.Y., Radhakrishnan, S. (2007) Corporate Disclosure by Family Firms. *Journal of Accounting and Economics*, 44,238-286.
- Alijoyo, A., Zaini, S. (2004). Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di perusahaan, Jakarta : PT. Indeks.
- Anderson, K.L., Deli, D.N., Gillan, S.L. (2003). Board of directors, audit committee, and the information content of earnings. *Working Paper Series, University of Delaware*.
- Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol Pada perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti Empiris Dari Perusahaan Publik di Indonesia. FEUI, Universitas Indonesia.
- BAPEPAM-LK. (2006). Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No: Kep-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Botosan, C.A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. *The Accounting Review*, 72, No.3,323-349.
- Chau, G.K., Gray, S.J. (2002). Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in Hong Kong and Singapore. *The International Journal of Accounting*, 37, 247-265.
- Chau, G.K., Gray, S.J. (2010) Family Ownership, Board Independence and Voluntary Disclosure: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Auditing and Taxation*, 19, 93-109.
- Chau, G., and P. Leung. (2006). The Impact of Board Composition and Family Ownership on Audit Committee Formation: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15, 1-15.

- Darrrough, M.N. (1993). Disclosure Policy and Competition: Cournot vs. Bertrand. *The Accounting Review*, 68 (3), 534-561.
- Fama, Eugene F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm *Journal of Political Economics*, 88 (2), 228-307.
- Fitriany. (2001). Signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Gujarati, D.N., Porter, D.C. (2009). Basic Econometrics. McGraw Hill International Edition.
- Healy, Paul M., Palepu, Krishna M. (2001). Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical .Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 405-440
- Hermawan, Ancella Anitawati. (2009). Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan oleh Keluarga, dan Peran Monitoring Bank Terhadap Kandungan Informasi Laba. FEUI, Universitas Indonesia.
- Indonesian Capital Market Directory (ICMD), BEJ, Jakarta, 2011 dan 2010.
- M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*, 54, 471-517.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics* 58, 3-27.
- Murni. (2003). Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi terhadap *Cost of Equity Capital* pada Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Nachrowi, D.N., dan Hardius Usman. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Nuryaman. (2009). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6, 1.
- O'Sullivan, M., Prcy, M., Stewart, J. 2008. Australian Evidence on Corporate Governance Attributes and Their Association with Forward Looking Information in the Annual Report. *Journal Manage Governance*, Vol.12, pp.5-35.
- Suripto. (1998). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan. Simposium Nasional Akuntansi II.
- Sekaran, U., Roger B. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- The OECD Principles of Corporate Governance, 2004. www.oecd.org.
- World Bank. (2010). Report on the Observance of Standards and Codes Corporate Governance Country Assessment Indonesia.
- Xiao, Jason Z., Yang, He, Chow, Chee W. (2004). The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-based Disclosure by Listed Chinese Companies. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23, 191-225.
<http://www.idx.co.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Winsorization *Treatment* Terhadap Variabel Penelitian (Output SPSS 17)

- Sebelum dilakukan *winsorization*

Descriptive Statistics

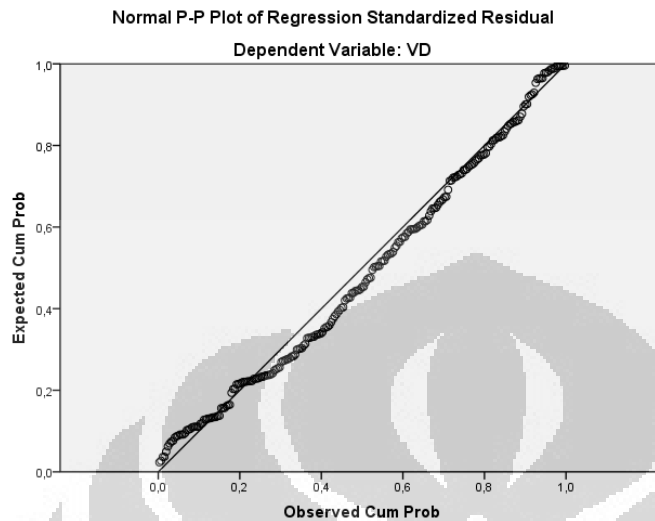
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
VD	237	,0870	,4130	,197397	,0784464	,854	,158
FamOwn	237	,0000	,9818	,285797	,2979320	,634	,158
ROE	237	-206,26	323,59	9,7492	36,45657	,903	,158
SIZE	237	8,84	18,54	13,9144	1,58479	,251	,158
LIQ	237	,15	113,72	3,2599	9,93100	8,963	,158
LEV	237	,04	,97	,4898	,21123	,017	,158
BIG4	237	,00	1,00	,4473	,49826	,214	,158
DK	237	-,296	0,1745	0,000	,08302	-,610	,158
KA	237	-,400	0,2362	0,000	,13014	-,588	,158
Valid N (listwise)	237						

- Setelah dilakukan *winsorization*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
VD	237	,0870	,4130	,197397	,0784464	,854	,158
FamOwn	237	,0000	,9818	,285797	,2979320	,634	,158
ROE	237	-206,26	323,59	9,7492	36,45657	,903	,158
SIZE	237	8,84	18,54	13,9144	1,58479	,251	,158
LIQ	237	,15	7,34	2,1336	1,71597	1,981	,158
LEV	237	,04	,97	,4898	,21123	,017	,158
BIG4	237	,00	1,00	,4473	,49826	,214	,158
DK	237	-,296	0,1745	0,000	,08302	-,610	,158
KA	237	-,400	0,2362	0,000	,13014	-,588	,158
Valid N (listwise)	237						

Lampiran 2: Uji Normalitas Atas Model 1 (Output SPSS 17)



Lampiran 3: Uji Multikolinieritas Atas Model 1 (Output SPSS 17)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,094	,045		2,079	,039		
FamOwn	-,061	,016	-,232	-3,920	,000	,930	1,075
ROE	,000	,000	-,061	-,961	,338	,796	1,256
SIZE	,010	,003	,210	3,307	,001	,806	1,241
LIQ	-,009	,003	-,195	-2,717	,007	,632	1,583
LEV	-,043	,028	-,116	-1,507	,133	,553	1,809
BIG4	,040	,010	,253	3,892	,000	,771	1,298

a. Dependent Variable: VD

Lampiran 4: Uji White Heteroskedastisitas Atas Model 1 (Output EViews

7)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.503047	Prob. F(26,210)	0.0627
Obs*R-squared	37.18406	Prob. Chi-Square(26)	0.0719
Scaled explained SS	34.94986	Prob. Chi-Square(26)	0.1127

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/04/12 Time: 00:54

Sample: 1 237

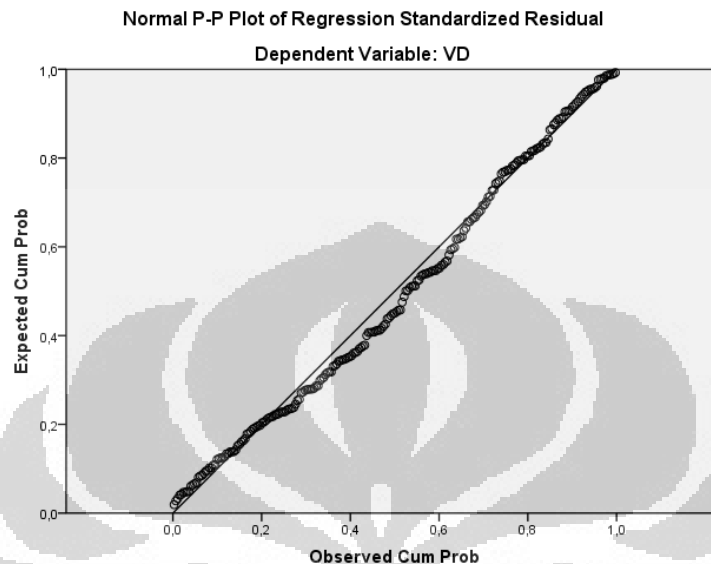
Included observations: 237

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.014364	0.029414	-0.488359	0.6258
FAMOWN	-0.033099	0.015896	-2.082236	0.0385
FAMOWN^2	0.007244	0.006648	1.089563	0.2772
FAMOWN*ROE	-8.46E-05	8.66E-05	-0.977285	0.3296
FAMOWN*SIZE	0.001335	0.001092	1.222781	0.2228
FAMOWN*LIQ	0.000360	0.001478	0.243584	0.8078
FAMOWN*LEV	0.011742	0.010072	1.165753	0.2450
FAMOWN*BIG4	-0.001140	0.003570	-0.319368	0.7498
ROE	1.59E-05	0.000186	0.085534	0.9319
ROE^2	-2.25E-07	1.84E-07	-1.217604	0.2247
ROE*SIZE	1.94E-06	1.25E-05	0.154305	0.8775
ROE*LIQ	3.74E-06	1.71E-05	0.218778	0.8270
ROE*LEV	-6.16E-05	8.64E-05	-0.713541	0.4763
ROE*BIG4	2.19E-05	3.62E-05	0.605599	0.5454
SIZE	0.001487	0.003976	0.374022	0.7088
SIZE^2	1.94E-05	0.000147	0.132474	0.8947
SIZE*LIQ	-0.000164	0.000244	-0.672566	0.5020
SIZE*LEV	-0.002034	0.002131	-0.954166	0.3411
SIZE*BIG4	-0.002363	0.000794	-2.975490	0.0033
LIQ	0.001320	0.003033	0.435245	0.6638
LIQ^2	2.41E-05	0.000177	0.136294	0.8917
LIQ*LEV	0.000292	0.002230	0.130778	0.8961
LIQ*BIG4	-0.000220	0.000923	-0.238119	0.8120
LEV	0.029829	0.032291	0.923754	0.3567
LEV^2	-0.011246	0.012127	-0.927370	0.3548
LEV*BIG4	0.004839	0.007008	0.690445	0.4907
BIG4	0.031938	0.012446	2.566098	0.0110

R-squared	0.156895	Mean dependent var	0.004579
Adjusted R-squared	0.052510	S.D. dependent var	0.006483
S.E. of regression	0.006311	Akaike info criterion	-7.186161
Sum squared resid	0.008364	Schwarz criterion	-6.791065
Log likelihood	878.5600	Hannan-Quinn criter.	-7.026912
F-statistic	1.503047	Durbin-Watson stat	1.248108
Prob(F-statistic)	0.062708		

Lampiran 5: Uji Normalitas Atas Model 2 (Output SPSS 17)



Lampiran 6: Uji Multikolinearitas Atas Model 2 (Output SPSS 17)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,136	,042		3,219	,001		
FamOwn	-,052	,015	-,199	-3,419	,001	,810	1,234
ROE	,000	,000	-,071	-1,207	,229	,792	1,262
SIZE	,006	,003	,116	1,928	,055	,757	1,322
LIQ	-,007	,003	-,158	-2,383	,018	,622	1,607
LEV	-,004	,027	-,010	-,136	,892	,506	1,975
BIG4	,027	,010	,171	2,779	,006	,723	1,383
DK	,248	,079	,262	3,133	,002	,393	2,544
KA	,193	,050	,321	3,853	,000	,396	2,523
FamOwnxDK	-,251	,192	-,108	-1,307	,193	,400	2,501
FamOwnxKA	-,221	,121	-,144	-1,823	,070	,441	2,267

a. Dependent Variable: VD

Lampiran 7: Treatment Atas Gejala Heteroskedastisitas Atas Model 2

(Output EVIEWS 7)

Dependent Variable: VD

Method: Least Squares

Date: 07/17/12 Time: 10:11

Sample: 1 237

Included observations: 237

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.136235	0.043366	3.141499	0.0019
FAMOWN	-0.052447	0.016163	-3.244828	0.0014
ROE	-0.000153	0.000107	-1.436638	0.1522
SIZE	0.005756	0.003170	1.815544	0.0708
LIQ	-0.007242	0.002934	-2.468677	0.0143
LEV	-0.003718	0.023352	-0.159227	0.8736
BIG4	0.026986	0.011148	2.420671	0.0163
DEKOM	0.247595	0.066761	3.708683	0.0003
KOMAU	0.193461	0.046592	4.152229	0.0000
FAMOWNXDEKOM	-0.251436	0.173522	-1.449020	0.1487
FAMOWNXKOMAU	-0.220735	0.103246	-2.137958	0.0336
R-squared	0.378209	Mean dependent var		0.197397
Adjusted R-squared	0.350696	S.D. dependent var		0.078446
S.E. of regression	0.063212	Akaike info criterion		-2.639355
Sum squared resid	0.903030	Schwarz criterion		-2.478391
Log likelihood	323.7636	Hannan-Quinn criter.		-2.574476
F-statistic	13.74662	Durbin-Watson stat		1.133349
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8: Uji Reliabilitas Skoring (Output SPSS 17)

- Uji Reabilitas Skoring VD

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	237	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	237	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,668	46

- Uji Reabilitas Skoring DK

Case Processing

Summary

		N	%
Cases	Valid	237	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	237	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,687	17

- Uji Reabilitas Skoring KA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	237	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	237	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,753	11

Lampiran 9: Item Skoring Pengungkapan Sukarela Tanpa Pembobotan

Item Pengungkapan	Skor
1 Background information :	
<i>a. Description of organizational structure, including the description of authority and responsibility</i>	1
<i>b. The effect of corporate strategy on current and future results are discussed</i>	1
<i>c. Barriers to entry are discussed</i>	1
<i>d. Impact of barriers to entry on current profits is discussed</i>	1
<i>e. Impact of barriers to entry on future profits is discussed</i>	1
2 Financial overview	
<i>a. Information of expenses, classified as fixed and variable costs</i>	1
<i>b. Information of expected return of a project to be done</i>	1
3 Key non-financial statistics :	
<i>a. Order backlog</i>	1
<i>b. Percentage of order backlog to be shipped next year</i>	1
<i>c. Percentage of sales in products designed in the last five years</i>	1
<i>d. Dollar/Rupiahs amount of new orders placed this year</i>	1
<i>e. Rejection / defect rates</i>	1
<i>f. Production lead time</i>	1
<i>g. Break-even sales \$'s</i>	1
<i>l. Volume of materials consumed</i>	1
<i>h. Prices of materials consumed</i>	1
<i>i. Ratio of inputs to output</i>	1
4 Projected information :	
<i>a. A comparison of previous earnings projections to actual earnings is provided</i>	1
<i>b. A comparison of previous sales projections to actual sales is provided</i>	1
<i>c. The impact of opportunities available to the firm on future sales or profit</i>	1
<i>d. A forecast of market share is provided</i>	1
<i>e. A cash flow projection is provided</i>	1
<i>f. A projection of future (not committed) capital expenditures</i>	1
<i>g. A projection of future profits is provided</i>	1
<i>h. A projection of future sales is provided</i>	1
<i>i. Factors affecting future business-political</i>	1
<i>j. Factors affecting future business-technology</i>	1
5 Management discussion and analysis :	

<i>a. Change in selling and administrative expenses</i>	1
<i>b. Change in interest expense or interest income</i>	1
<i>c. Change in inventory</i>	1
<i>d. Change in capital expenditures or R & D</i>	1
6 Research and Development Activities	
<i>a. Company's policy on research and development</i>	1
<i>b. Discussion on future R&D activities</i>	1
<i>c. Forecast of R&D expenditure</i>	1
<i>d. Number of research personnel employed</i>	1
7 Employee information	
<i>a. Average compensation / welfare per employee</i>	1
<i>b. Age of key employees</i>	1
<i>c. Equal employment policy</i>	1
<i>d. Description of problems faced in recruiting employee and actions taken to handle them</i>	1
<i>e. Breakdown of employees by line of business</i>	1
<i>f. Breakdown of employees by geographic area</i>	1
<i>g. Categories of employees by sex</i>	1
<i>h. Description of work safety, including the cost of safety measures</i>	1
<i>i. Discussion of employee turnover</i>	1
8 Social reporting and value added information	
<i>a. Value added statement</i>	1
<i>b. Value added ratios</i>	1
TOTAL	46

Sumber: Adhariani (2006)

Keterangan:

Item di atas merupakan *item* pengungkapan yang berasal dari penelitian Adharini (2006) yang menggabungkan *item* pengungkapan Sitanggang (2002), penelitian Suripto (1999), penelitian Botosan (1997), dan disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No:KEP-134/BL/2006.

Lampiran 10: Item Skoring Efektifitas Dewan Komisaris

No.	Description	Good	Fair	Poor
A. Board Independence				
1	<p>Among board of commissioners, how many are independent commissioners? <i>If more than 50% of the board is independent, the company will be given a "3" Score. Firms with 30% to 50% of the board made up of independent commissioners will earn a "2" Score. If less than 30% of the board is independent, or no information, the company will earn a "1" Score.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
2	<p>Is the chairman an independent commissioner? <i>If the chairman is an independent commissioner, the firm will a "3" Score and "1" Score otherwise or if no information.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
3	<p>Does the company state in its annual report the definition of independence? <i>Firms with a clear definition of independence in the annual report will earn a "3" Score. A "1" Score will be given if the company does not define independence or if no information.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
4	<p>Among board of commissioners, how many are employees of shareholders of affiliated companies owned by shareholders? <i>If there is more than 50% of the board, or no information, the company will be given a "1" Score. If there is 30% to 50% of the board, the firm will earn a "2" Score. If less than 30% of the board, the company will earn a 'good'.</i></p> <p>Sumber: Lampiran Kep-339/BEJ/07-2001</p>			
5	<p>Does the company have a nominating committee and remuneration committee? <i>Firms that have both committee will earn a "3" Score. Firms that have at least one of the two committees will earn a "2" Score. A "1" Score will be given to the company that does not have any of these committees or if no information.</i></p> <p>Sumber: KNKG (2006)</p>			
6	<p>What is the average years the Board of Commissioners' tenure? <i>If the average tenure of the board is less than 5 years, the company will receive a "3" Score. If the average tenure of boards is between 5 and 10 years, the score is 'fair', and if the average tenure is more than 10 years, the score will be 'poor'.</i></p>			

	Sumber: IICD (2005)			
B. Board Activities				
7	<p>Does the company clearly describes the board responsibilities? <i>If board responsibilities are clearly stated and disclosure, the firm will receive a "3" Score. Company that has not defined board responsibilities, or no information will earn a 'poor' score.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
8	<p>How many meetings were held during the year? <i>If the board meets more than 6 (six) time, the firm earns a "3" Score. If 4 – 6 meeting, the firm is scored as 'fair', while less than 4 (four) times or no information is scored as 'poor'.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
9	<p>What is attendance performance of the board members during the year? <i>If the overall board attendance for the year is greater than 80%, the firm earns a "3" Score. If attendance is 70%-80% receives a "2" Score, and less than 70% or no information receives a "1" Score. Will be given if the company does not define independence or if no information.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
10	<p>Does the company have a separate board of commissioner's report describing their responsibilities in reviewing firm's financial statement? <i>Firms will receive a "3" Score if they produce a board of commissioner's reports as part of the annual report. A score of 'poor' will bw awarded if there is no report from the board or no information.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
11	<p>Does the BoC conduct annual performance assessment of the BoD? <i>If the board evaluates the performance of the top executive officer, the company received a "3" Score and "1" Score otherwise or no information.</i></p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
12	<p>Does the board conduct assessment of the bussines prospects prepared by the BoD? <i>If the board assess the bussines prospects, the company received a 'good' and "1" Score otherwise or no information.</i></p> <p>Sumber: Kep-134/BL/2006</p>			
C. Board Size				
13	What is the size of the board of commissioner?			

	<p>A "3" Score will be given to firm with 5 – 10 board members. Firm with board size of 11 - 15 members received a "2" Score. Boards with size of 16 or more or less than 5 members, or no information will receive a "1" Score.</p> <p>Sumber: IICD (2005)</p>			
D. Board Expertise and Competence				
14	<p>Does the board member have a sophisticated knowledge about accounting and finance?</p> <p><i>If there is more than 50% of the board has the knowledge, the company will be given a "3" Score. If there is 30% - 50% of the board, the firm will earn a "2" Score. If less than 30% of the board, or no information, the company will earn a "1" Score.</i></p> <p>Sumber: Xie <i>et al.</i> (2003)</p>			
15	<p>Does the board member have sufficient experience about bussines (i.e. has the experience as a member of the board of commissioners in any company including this company or as a CEO in other company)?</p> <p><i>If there is more than 50% of the board has the experience, the company will be given a "3" Score. If ther is 3-% - 50% of the board, the firm will earn a "2" Score. If less than 30% of the board, or no information, the company will earn a "1" Score.</i></p> <p>Sumber: Chen <i>et al.</i> (2006)</p>			
16	<p>Does the board member have a sophisticated knowledge about the company's bussines?</p> <p><i>If there is more than 50% of the board member has the knowledge, the company will be given a "3" Score. If there is 30% - 50% of the board member has the knowledge, the firm will earn a "2" Score. If less than 30%, the company will earn a "1" Score.</i></p> <p>Sumber: Xie <i>et al.</i> (2003)</p>			
17	<p>What is the average age of the board?</p> <p>If the average age of the board is more than 40 years old, the company will receive a "3" score. If the average age of the board is between 30 and 40 years old, the score is "2", and if the average age is below 30 years, the score will be "1"</p>			
Total Score				

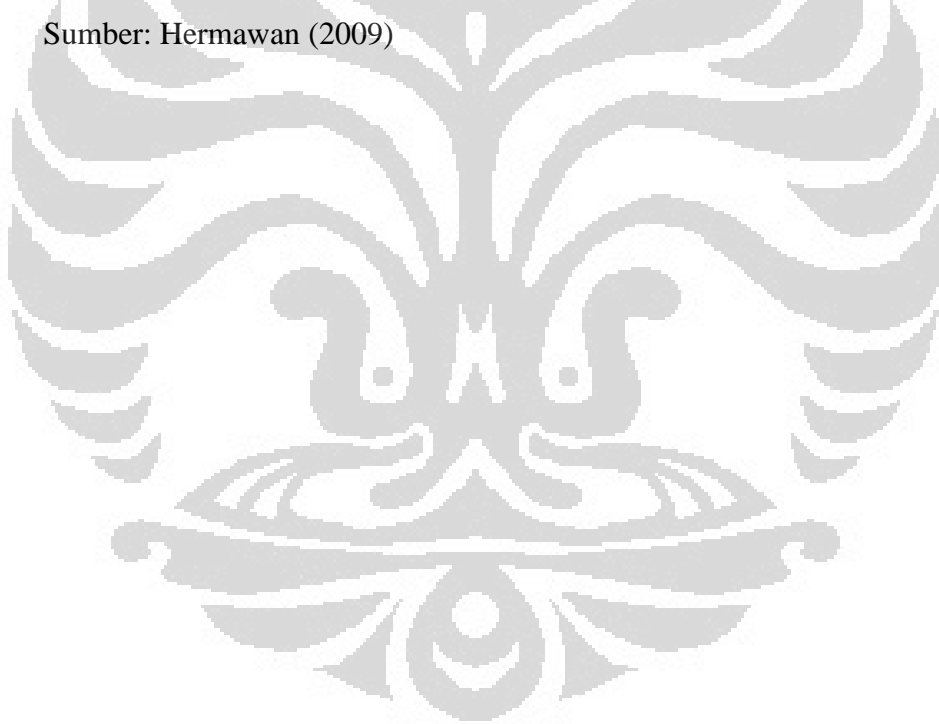
Sumber: Hermawan (2009)

Lampiran 11 : Item Skoring Efektifitas Komite Audit

No.	Description	Good	Fair	Poor
A. Audit Committee Activities				
	Assess the responsibilities fulfilled by the audit committees during the year, include the following items:			
1	Evaluating internal control			
2	Propose auditor Financial			
3	report review Evaluating			
4	legal compliance			
5	Prepare a complete audit committee report for disclosure <i>In each category, if responsibility is fulfilled, firm will receive a "3" score, if the responsibility is not fulfilled or no information, the company will receive a "2" score.</i> Sumber: IICD (2005)			
6	How many meetings were held during the year? <i>If the audit committee meets more than six times, the firm will earn a "3" score. If 4 – 6 meetings, the firm will earn a "2" score, while less than four times or no information will be scored as "1"</i> Sumber: IICD (2005)			
7	What is attendance performance of the audit committee members during the year? <i>If the overall audit committee attendance for the year is greater than 80%, the firm earns a "3" score. If the attendance is 70% - 80%, receive a "2" score and less than 70% or no information, receive "1" score.</i> Sumber: IICD (2005)			
8	Does the committee audit evaluate the scope, accuracy and cost effectiveness, independency and objectivity of external auditor? <i>If the audit committee evaluate all of the items, the firm has a "3" score. If only part of the items was evaluated, the score will be "2". And if none of the items was evaluated, the score will be "1"</i> Sumber: Lampiran Kep-339/BEJ/07-2001			
B. Audit Committee Size				
9	What is the size of audit committee? <i>If there are 3 persons in the audit committee, the score will be "3", and if there are more than 3 persons in the audit committee, the score will be "2". If there is no information the score will be "1"</i> Sumber: Lampiran Kep-339/BEJ/07-2001			
C. Audit Committee Expertise and Competence				
10	Does the audit committee have an accounting background?			

	<p><i>If the company has more than 1 person with accounting background, the firm will earn a "3" score. If the company has only 1 person with accounting background, the firm will earn a "2" score and if none has an accounting background or no information, the score will be "1"</i></p> <p>Sumber: Dhaliwal <i>et al.</i> (2007)</p>			
11	<p>What is the average age of the audit committee? <i>If the average age of the audit committee is more than 40 years old, the company will receive a "3" score. If the average age of the audit committee is between 30 and 40 years old, the score is "2", and if the average age is below 30 years, the score will be "1"</i></p> <p>Sumber: Anderson <i>et al.</i> (2004)</p>			

Sumber: Hermawan (2009)



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-134/BL/2006**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN BAGI
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam penyusunan laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Tahunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

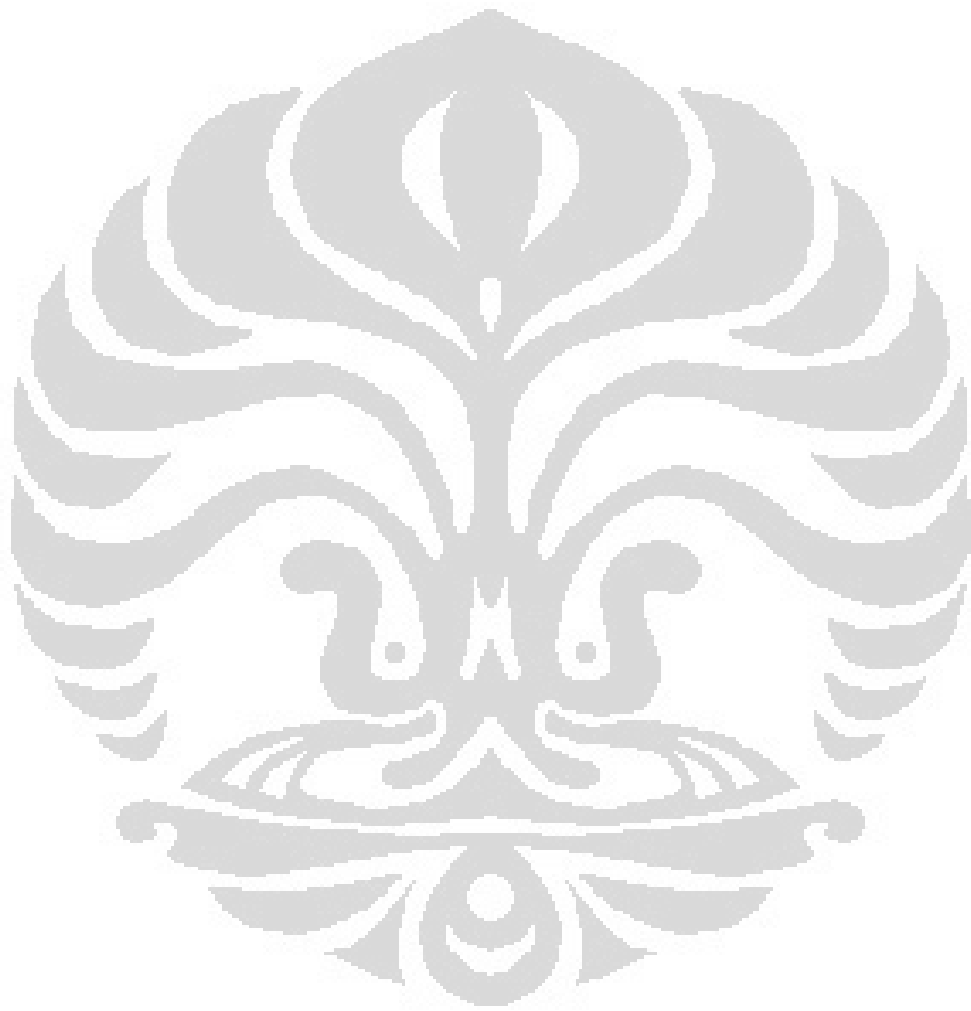
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan

ttd.

Abraham Bastari
NIP 060076245

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

PERATURAN NOMOR X.K.6 : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

- a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli.

Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris.

- b. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.
- c. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- d. Dalam hal Emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya.
- e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sepanjang laporan tahunan dimaksud:
 - 1) disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan
 - 2) sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar laporan tahunan yang memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan.

2. BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN

- a. Ketentuan Umum

- 1) Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 2 -

dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.

- 2) Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia.
- 3) Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran kurang lebih 21 X 30 sentimeter dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.

b. Ikhtisar Data Keuangan Penting

- 1) Laporan tahunan wajib memuat informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun, sekurang-kurangnya:
 - a) penjualan/pendapatan usaha;
 - b) laba (rugi) kotor;
 - c) laba (rugi) usaha;
 - d) laba (rugi) bersih;
 - e) jumlah saham yang beredar;
 - f) laba (rugi) bersih per saham ;
 - g) proforma penjualan/pendapatan usaha (jika ada);
 - h) proforma laba (rugi) bersih (jika ada);
 - i) proforma laba (rugi) bersih per saham (jika ada);
 - j) modal kerja bersih;
 - k) jumlah aktiva;
 - l) jumlah investasi;
 - m) jumlah kewajiban;
 - n) jumlah ekuitas;
 - o) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aktiva;
 - p) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - q) rasio lancar;
 - r) rasio kewajiban terhadap ekuitas;
 - s) rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva;
 - t) rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan (khusus untuk perbankan);
 - u) rasio kecukupan modal (khusus untuk perbankan); dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 3 -

- v) informasi keuangan perbandingan lainnya yang relevan dengan perusahaan.
 - 2) Laporan tahunan wajib memuat informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus.
- c. Laporan Dewan Komisaris
- Laporan dewan komisaris sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan;
 - 2) pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi;
 - 3) komite-komite yang berada dibawah pengawasan dewan komisaris; dan
 - 4) perubahan komposisi anggota dewan komisaris (jika ada).
- d. Laporan Direksi
- Laporan direksi sekurang-kurangnya memuat antara lain uraian singkat mengenai:
- 1) kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
 - 2) gambaran tentang prospek usaha;
 - 3) penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan; dan
 - 4) perubahan komposisi anggota direksi (jika ada).
- e. Profil Perusahaan
- Profil perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) nama dan alamat perusahaan;
 - 2) riwayat singkat perusahaan;
 - 3) bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan;
 - 4) struktur organisasi dalam bentuk bagan;
 - 5) visi dan misi perusahaan;
 - 6) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris;
 - 7) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi;
 - 8) jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misalnya: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 4 -

- 9) uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya yang terdiri dari:
 - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) direktur dan komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima per seratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 10) nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);
 - 11) kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada);
 - 12) kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);
 - 13) nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek (jika ada);
 - 14) nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal;
 - 15) penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional (jika ada); dan
 - 16) nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).
- f. Analisis dan Pembahasan Manajemen
- Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) tinjauan operasi per segmen usaha, antara lain memuat pembahasan mengenai:
 - a) produksi;
 - b) penjualan/pendapatan usaha;
 - c) profitabilitas; dan
 - d) peningkatan kapasitas produksi;
 - 2) analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, antara lain mengenai:
 - a) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva;
 - b) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban;
 - c) penjualan/pendapatan usaha;
 - d) beban usaha; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 5 -

- e) laba bersih;
- 3) bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan;
- 4) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 5) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi;
- 6) komponen-komponen substansial dari pendapatan atau beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan;
- 7) jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru;
- 8) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun;
- 9) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;
- 10) prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya;
- 11) aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar;
- 12) kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen (kas per saham dan atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
- 13) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis. Dalam hal terdapat perubahan dari Prospektus agar dijelaskan;
- 14) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan Pihak Afiliasi;
- 15) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 6 -

16) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).

g. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dewan komisaris, mencakup antara lain:
 - a) uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris;
 - b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota dewan komisaris; dan
 - c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dewan komisaris;
- 2) Direksi, mencakup antara lain:
 - a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi;
 - b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi;
 - c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi; dan
 - d) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi;
- 3) Komite audit, mencakup antara lain:
 - a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit;
 - b) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit; dan
 - d) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit;
- 4) Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan (seperti: komite nominasi dan komite remunerasi), yang mencakup:
 - a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite;
 - b) independensi anggota komite;
 - c) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite; dan
 - e) uraian pelaksanaan kegiatan komite;
- 5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
 - a) nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan; dan
 - b) uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 7 -

- 6) uraian mengenai sistem pengendalian interen yang diterapkan oleh perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (*internal control and audit*);
 - 7) penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, misalnya: risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah;
 - 8) uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 9) perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris yang sedang menjabat, antara lain meliputi:
 - a) pokok perkara/gugatan;
 - b) kasus posisi;
 - c) status penyelesaian perkara/gugatan;
 - d) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan; dan
 - 10) penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan.
- b. Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
- Laporan tahunan wajib memuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
- Laporan tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di bidang akuntansi serta wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- d. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- 1) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sedang menjabat;
 - 2) Tanda tangan dimaksud dituangkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib dicantumkan pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;
 - 3) Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-134/BL/2006

Tanggal : 7 Desember 2006

- 8 -

- 4) Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.
3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 7 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan

ttd.

Abraham Bastari

NIP 060076245